



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, untuk melaksanakan tugas pokok di daerah, Menteri Keuangan berwenang dan menetapkan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Direktorat Jenderal Pajak adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya atau unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direktur Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya atau pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di daerah.

BAB II
INSTANSI VERTIKAL

Pasal 2

Instansi Vertikal terdiri atas:

- a. kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- b. kantor pelayanan pajak; dan
- c. kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan.

BAB III
KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Jenis kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus; dan
- c. kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

Pasal 5

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, dan evaluasi di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan penggalian potensi perpajakan, pemberian bimbingan pengawasan, pendaftaran objek pajak, pendataan, penilaian, dan pengenaan, serta dukungan teknologi informasi;
- c. pelaksanaan administrasi dan pemberian bimbingan pemeriksaan, pemberian bimbingan penagihan, dan kegiatan intelijen, serta administrasi bukti permulaan dan penyidikan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan pendaftaran wajib pajak, penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen, serta pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan penanganan sengketa di bidang keberatan, banding, dan pengurangan; dan
- f. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, advokasi hukum, pelaporan, kepatuhan internal, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 7

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
- c. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
- d. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- e. Bidang Keberatan dan Banding; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia, keuangan, advokasi hukum, pelaporan, kepatuhan internal, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan manajemen kinerja pegawai;
- b. perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
- d. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan advokasi hukum, kinerja organisasi, dan kepatuhan internal;
- f. pelaksanaan reviu manajemen risiko;
- g. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas;

- h. penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan pelaksanaan tugas;
- i. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan tata usaha, dokumen, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- j. pelaksanaan urusan protokoler.

Pasal 10

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 11

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan manajemen kinerja pegawai, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan advokasi hukum, manajemen kinerja organisasi, dan kepatuhan internal, pelaksanaan reviu manajemen risiko, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan pelaksanaan tugas.
- (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan urusan tata usaha, pengelolaan dokumen, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaksanaan urusan protokoler.

Pasal 12

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penggalian potensi perpajakan, bimbingan pengawasan, pendaftaran objek pajak, pendataan, penilaian, dan pengenaan, serta dukungan teknologi informasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi data dan informasi perpajakan, analisis potensi perpajakan, dan penerimaan pajak;
- b. pelaksanaan manajemen risiko;
- c. pelaksanaan evaluasi wajib pajak terdaftar;
- d. pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan dan penggalian potensi perpajakan;
- e. pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pendataan, penilaian, dan pengenaan di bidang perpajakan;
- f. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran objek pajak;
- g. pemberian dukungan teknologi informasi; dan
- h. pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi aplikasi perpajakan.

Pasal 14

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

Pasal 15

- (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi data dan informasi, analisis potensi, dan penerimaan pajak, pelaksanaan manajemen risiko, serta pelaksanaan evaluasi wajib pajak terdaftar.
- (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan, penggalian potensi perpajakan, pendataan, penilaian, dan pengenaan, serta pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran objek pajak.
- (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknologi informasi serta pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi aplikasi perpajakan.

Pasal 16

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan bimbingan pemeriksaan, bimbingan penagihan, kegiatan intelijen, serta administrasi bukti permulaan dan penyidikan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan bahan baku pemeriksaan pajak;
- b. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak;
- c. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak;

- d. penelaahan sejawat (*peer review*) atas hasil kegiatan pemeriksaan pajak;
- e. koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pemeriksaan pajak;
- f. koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penagihan pajak;
- g. koordinasi dan pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan kegiatan intelijen;
- i. pelaksanaan administrasi kegiatan intelijen;
- j. koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- l. pelaksanaan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- m. pelaksanaan kegiatan dan administrasi forensik digital;
- n. pemberian bimbingan terkait pengusulan dan kolaborasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- o. pengelolaan benda sitaan, ruangan tersangka, dan laboratorium forensik digital.

Pasal 18

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
- c. Seksi Intelijen; dan
- d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

Pasal 19

- (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan perencanaan bahan baku pemeriksaan pajak, pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemeriksaan pajak, penelaahan sejawat (*peer review*) atas hasil kegiatan pemeriksaan pajak, serta koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pemeriksaan pajak.
- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak serta koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penagihan pajak.
- (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan dan administrasi intelijen serta koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengamatan.
- (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan dan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, forensik digital, pemberian bimbingan terkait pengusulan dan kolaborasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, serta pengelolaan benda

sitaan, ruangan tersangka, dan laboratorium forensik digital.

Pasal 20

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pendaftaran wajib pajak, penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen, serta pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan perpajakan dan pengelolaan dokumen perpajakan;
- b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan;
- c. pelaksanaan administrasi kegiatan penyuluhan perpajakan;
- d. pengelolaan dokumen perpajakan;
- e. pengelolaan perpustakaan;
- f. pemutakhiran panduan informasi penyuluhan perpajakan bagi pegawai;
- g. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, konsultasi, dan pendaftaran wajib pajak;
- h. penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- i. pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- j. pelaksanaan pelayanan perpajakan;
- k. pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang perpajakan;
- l. pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal;
- m. pengelolaan media komunikasi; dan
- n. pemutakhiran panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal.

Pasal 22

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pengelolaan dokumen perpajakan, pelaksanaan kegiatan dan administrasi penyuluhan perpajakan, pengelolaan dokumen perpajakan, pengelolaan perpustakaan, serta pemutakhiran panduan informasi penyuluhan perpajakan bagi pegawai.

- (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perpajakan, konsultasi perpajakan, dan pendaftaran wajib pajak, penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta pelaksanaan pelayanan perpajakan.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang perpajakan, pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal, pengelolaan media komunikasi, serta pemutakhiran panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal.

Pasal 24

Bidang Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan penanganan sengketa di bidang keberatan, banding, dan pengurangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penanganan sengketa di bidang keberatan, banding, dan pengurangan;
- b. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan;
- c. penanganan sengketa gugatan dan banding di Pengadilan Pajak;
- d. pengawasan pelaksanaan putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali;
- e. penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus; dan
- f. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak.

Pasal 26

Bidang Keberatan dan Banding terdiri atas:

- a. Seksi Keberatan dan Banding I;
- b. Seksi Keberatan dan Banding II;
- c. Seksi Keberatan dan Banding III; dan
- d. Seksi Keberatan dan Banding IV.

Pasal 27

Seksi Keberatan dan Banding I, Seksi Keberatan dan Banding II, Seksi Keberatan dan Banding III, dan Seksi Keberatan dan Banding IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penanganan sengketa di bidang keberatan, banding, dan pengurangan, penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan, penanganan sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, pengawasan

pelaksanaan putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali, dan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, serta pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan penugasan.

Paragraf 3

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan penggalian potensi perpajakan, pemberian bimbingan pengawasan, dan dukungan teknologi informasi;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan pendaftaran, ekstensifikasi, pendataan, penilaian, dan pengenaan, serta penggalian potensi perpajakan dan pemberian bimbingan pengawasan wajib pajak lainnya;
- d. pelaksanaan administrasi dan pemberian bimbingan pemeriksaan, pemberian bimbingan penagihan, kegiatan intelijen, serta administrasi bukti permulaan dan penyidikan;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen, serta pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan penanganan sengketa di bidang keberatan, banding, dan pengurangan; dan
- g. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, advokasi hukum, pelaporan, kepatuhan internal, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 29

Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;
- c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;
- d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;
- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan; dan

- g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 30

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia, keuangan, advokasi hukum, pelaporan, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan manajemen kinerja pegawai;
- b. perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
- d. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan advokasi hukum, kinerja organisasi, dan kepatuhan internal;
- f. pelaksanaan reviu manajemen risiko;
- g. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas;
- h. penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan pelaksanaan tugas;
- i. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan tata usaha, dokumen, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- j. pelaksanaan urusan protokoler.

Pasal 32

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 33

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan manajemen kinerja pegawai, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaksanaan urusan advokasi hukum, manajemen kinerja organisasi, dan kepatuhan internal,

pelaksanaan reviu manajemen risiko, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas, dan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan pelaksanaan tugas.

- (4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan urusan tata usaha, pengelolaan dokumen, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaksanaan urusan protokoler.

Pasal 34

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penggalian potensi perpajakan, bimbingan pengawasan wajib pajak strategis, dan dukungan teknologi informasi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi data dan informasi, analisis potensi, dan penerimaan pajak wajib pajak strategis;
- b. pelaksanaan manajemen risiko;
- c. pelaksanaan evaluasi wajib pajak terdaftar;
- d. pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan dan penggalian potensi perpajakan wajib pajak strategis;
- e. pemberian dukungan teknologi informasi; dan
- f. pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi aplikasi perpajakan.

Pasal 36

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Potensi;
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

Pasal 37

- (1) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi data dan informasi, analisis potensi, dan penerimaan pajak wajib pajak strategis, pelaksanaan manajemen risiko, dan penyiapan bahan penetapan wajib pajak strategis, serta pelaksanaan evaluasi wajib pajak terdaftar.
- (2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan dan penggalian potensi perpajakan wajib pajak strategis.
- (3) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan dukungan teknologi informasi, serta pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi aplikasi perpajakan.

Pasal 38

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pendaftaran, ekstensifikasi, pendataan, penilaian, dan pengenaan, serta pelaksanaan penggalan potensi perpajakan dan bimbingan pengawasan wajib pajak lainnya.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pengamatan potensi perpajakan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran wajib pajak dan objek pajak;
- b. pelaksanaan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar wajib pajak;
- c. penyelesaian urusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang;
- d. pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penerimaan pajak wajib pajak lainnya;
- e. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi;
- f. pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan dan penggalan potensi perpajakan wajib pajak lainnya;
- g. pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pendataan, penilaian, dan pengenaan, data dan informasi perpajakan wajib pajak lainnya, serta analisis potensi perpajakan wajib pajak lainnya;
- h. pemberian dukungan pemutakhiran basis data pajak;
- i. pemberian bimbingan dan pemantauan atas kegiatan pengumpulan data lapangan; dan
- j. penyusunan dan pengelolaan laporan monografi fiskal.

Pasal 40

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
- b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan
- c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.

Pasal 41

- (1) Seksi Bimbingan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pengamatan potensi perpajakan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran wajib pajak dan objek pajak, analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar wajib pajak, dan penyelesaian urusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, serta pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penerimaan pajak wajib pajak lainnya.
- (2) Seksi Bimbingan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi

serta pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan dan penggalan potensi perpajakan wajib pajak lainnya.

- (3) Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pendataan, penilaian, pengenaan, data dan informasi perpajakan wajib pajak lainnya, dan analisis potensi perpajakan wajib pajak lainnya, pemberian dukungan pemutakhiran basis data pajak, pemberian bimbingan dan pemantauan atas kegiatan pengumpulan data lapangan, serta penyusunan dan pengelolaan laporan monografi fiskal.

Pasal 42

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan bimbingan pemeriksaan, bimbingan penagihan, kegiatan intelijen, serta administrasi bukti permulaan dan penyidikan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan bahan baku pemeriksaan pajak;
- b. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak;
- c. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak;
- d. penelaahan sejawat (*peer review*) atas hasil kegiatan pemeriksaan pajak;
- e. koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pemeriksaan pajak;
- f. koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penagihan pajak;
- g. koordinasi dan pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan kegiatan intelijen;
- i. pelaksanaan administrasi kegiatan intelijen;
- j. koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- l. pelaksanaan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- m. pelaksanaan kegiatan dan administrasi forensik digital;
- n. pemberian bimbingan terkait pengusulan dan kolaborasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- o. pengelolaan benda sitaan, ruangan tersangka, dan laboratorium forensik digital.

Pasal 44

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
- c. Seksi Intelijen; dan
- d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

Pasal 45

- (1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan perencanaan bahan baku pemeriksaan pajak, pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemeriksaan pajak, penelaahan sejawat (*peer review*) atas hasil kegiatan pemeriksaan pajak, serta koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pemeriksaan pajak.
- (2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak serta koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penagihan pajak.
- (3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan dan administrasi intelijen serta koordinasi, pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengamatan.
- (4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan dan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, forensik digital, pemberian bimbingan terkait pengusulan dan kolaborasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, serta pengelolaan benda sitaan, ruangan tersangka, dan laboratorium forensik digital.

Pasal 46

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen, serta pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan perpajakan dan pengelolaan dokumen perpajakan;
- b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan;
- c. pelaksanaan administrasi kegiatan penyuluhan perpajakan;
- d. pengelolaan dokumen perpajakan;
- e. pengelolaan perpustakaan;
- f. pemutakhiran panduan informasi penyuluhan perpajakan bagi pegawai;
- g. pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan konsultasi perpajakan;

- h. penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- i. pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- j. pelaksanaan pelayanan perpajakan;
- k. pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang perpajakan;
- l. pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal;
- m. pengelolaan media komunikasi; dan
- n. pemutakhiran panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal.

Pasal 48

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 49

- (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pengelolaan dokumen perpajakan, pelaksanaan kegiatan dan administrasi penyuluhan perpajakan, pengelolaan dokumen perpajakan, dan pengelolaan perpustakaan, serta pemutakhiran panduan informasi penyuluhan perpajakan bagi pegawai.
- (2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perpajakan dan konsultasi perpajakan, penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, dan pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan, serta pelaksanaan pelayanan perpajakan.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang perpajakan, pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal, dan pengelolaan media komunikasi, serta pemutakhiran panduan informasi perpajakan bagi pihak eksternal.

Pasal 50

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penanganan sengketa di bidang keberatan, banding, dan pengurangan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penanganan sengketa di bidang keberatan, banding, dan pengurangan;
- b. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan;

- c. penanganan sengketa gugatan dan banding di Pengadilan Pajak;
- d. pengawasan pelaksanaan putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali;
- e. penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus; dan
- f. pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak.

Pasal 52

Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan terdiri atas:

- a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;
- b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
- c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan
- d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV.

Pasal 53

Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III, dan Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penanganan sengketa di bidang keberatan, banding, dan pengurangan, penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan, penanganan sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, pengawasan pelaksanaan putusan banding, putusan gugatan, dan putusan peninjauan kembali, penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, serta pemberian bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan penugasan.

BAB IV

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 54

- (1) Kantor pelayanan pajak merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Kantor pelayanan pajak dipimpin oleh seorang kepala kantor pelayanan pajak.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) Jenis kantor pelayanan pajak terdiri atas:
 - a. kantor pelayanan pajak wajib pajak besar;
 - b. kantor pelayanan pajak khusus;
 - c. kantor pelayanan pajak madya; dan
 - d. kantor pelayanan pajak pratama.
- (2) Kantor pelayanan pajak wajib pajak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu;
 - b. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;
 - c. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga; dan
 - d. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat.
- (3) Kantor pelayanan pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;
 - b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;
 - c. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga;
 - d. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat;
 - e. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima;
 - f. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam;
 - g. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing;
 - h. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi; dan
 - i. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

Pasal 56

Kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak khusus, kantor pelayanan pajak madya, dan kantor pelayanan pajak pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, serta penjaminan kualitas data di bidang pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
dan Kantor Pelayanan Pajak Khusus

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kantor pelayanan pajak wajib pajak besar dan kantor pelayanan pajak khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak strategis nasional;
 - b. pelaksanaan evaluasi wajib pajak terdaftar;
 - c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan kepatuhan internal;
 - d. pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko;
 - e. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
 - f. pelaksanaan penjaminan kualitas data;
 - g. pengelolaan penerimaan pajak;
 - h. pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
 - i. pelaksanaan tindak lanjut atas distribusi data;
 - j. penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan;
 - k. pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - l. pemberian layanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan;
 - m. pengelolaan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak;
 - n. pengelolaan pelaporan wajib pajak;
 - o. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - p. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
 - q. pendataan dan pengenaan wajib pajak dan objek pajak;
 - r. pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak;
 - s. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
 - t. perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi;
 - u. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
 - v. pelaksanaan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan;
 - w. pelaksanaan kegiatan pengamatan;
 - x. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak;
 - y. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk lainnya di bidang perpajakan; dan
 - z. pelaksanaan administrasi kantor.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing juga menyelenggarakan fungsi pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Pasal 58

Kantor pelayanan pajak wajib pajak besar dan kantor pelayanan pajak khusus terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV; dan
- i. Seksi Pengawasan V.

Pasal 59

- (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan kepatuhan internal, manajemen kinerja pegawai, manajemen risiko, penyusunan laporan, dan pengelolaan dokumen, serta pemberian dukungan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak.
- (2) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan penjaminan kualitas data, pengelolaan penerimaan pajak, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, tindak lanjut atas distribusi data, penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan, pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan manajemen kinerja organisasi, serta pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pemberian layanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, pengelolaan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak, pengelolaan pelaporan wajib pajak, penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- (4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak, pendataan dan pengenaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.
- (5) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi, pengamatan potensi dan penguasaan informasi perpajakan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pelaksanaan kegiatan pengamatan, pelaksanaan pengawasan kepatuhan

- kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- (6) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing juga mempunyai tugas melakukan pemeriksaan/penelitian berkaitan dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
 - (7) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi Pengawasan II pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar dan kantor pelayanan pajak khusus juga mempunyai tugas melakukan perencanaan, manajemen, administrasi, dan pelaporan kegiatan pengamatan.
 - (8) Direktur Jenderal menetapkan pembagian wilayah kerja dan/atau objek dan jumlah seksi pengawasan.

Paragraf 3
Kantor Pelayanan Pajak Madya

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kantor pelayanan pajak madya menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak strategis regional;
- b. pelaksanaan evaluasi wajib pajak terdaftar;
- c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan kepatuhan internal;
- d. pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko;
- e. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- f. pelaksanaan penjaminan kualitas data;
- g. pengelolaan penerimaan pajak;
- h. pengelolaan dan pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- i. pelaksanaan tindak lanjut atas distribusi data;
- j. penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan;
- k. pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. pemberian layanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan;
- m. pengelolaan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak;
- n. pengelolaan pelaporan wajib pajak;
- o. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- p. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- q. pendataan dan pengenaan wajib pajak dan objek pajak;
- r. pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak;
- s. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;

- t. perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi;
- u. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
- v. pelaksanaan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan;
- w. pelaksanaan kegiatan pengamatan;
- x. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak;
- y. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk lainnya di bidang perpajakan; dan
- z. pelaksanaan administrasi kantor.

Pasal 61

Kantor pelayanan pajak madya terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V; dan
- j. Seksi Pengawasan VI.

Pasal 62

- (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan kepatuhan internal, manajemen kinerja pegawai, manajemen risiko, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, serta pemberian dukungan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak.
- (2) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan penjaminan kualitas data, pengelolaan penerimaan pajak, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, tindak lanjut atas distribusi data, penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan, pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, manajemen kinerja organisasi, serta pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pemberian layanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, pengelolaan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak, pengelolaan pelaporan wajib pajak, penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- (4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak, pendataan dan pengenaan wajib pajak dan objek pajak, pengelolaan barang sitaan

sehubungan dengan penagihan pajak, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.

- (5) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi, pengamatan potensi dan penguasaan informasi perpajakan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pelaksanaan kegiatan pengamatan, pelaksanaan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- (6) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi Pengawasan II pada kantor pelayanan pajak madya juga mempunyai tugas melakukan perencanaan, manajemen, administrasi, dan pelaporan kegiatan pengamatan.
- (7) Direktur Jenderal menetapkan pembagian wilayah kerja dan/atau objek dan jumlah seksi pengawasan.

Paragraf 4

Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kantor pelayanan pajak pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan kepatuhan internal;
- c. pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko;
- d. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- e. pelaksanaan penjaminan kualitas data;
- f. pengelolaan penerimaan pajak;
- g. pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- h. pelaksanaan tindak lanjut atas distribusi data;
- i. penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan;
- j. pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. pemberian layanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan;
- l. pengelolaan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak;
- m. pengelolaan pelaporan wajib pajak;
- n. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- o. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

- p. pendataan dan pengenaan wajib pajak dan objek pajak;
- q. pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak;
- r. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- s. perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pelaksanaan penguasaan wilayah;
- t. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
- u. pelaksanaan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan;
- v. pelaksanaan kegiatan pengamatan;
- w. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang kantor pelayanan pajak;
- x. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk lainnya di bidang perpajakan; dan
- y. pelaksanaan administrasi kantor.

Pasal 64

Kantor pelayanan pajak pratama dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. kantor pelayanan pajak pratama kelompok I; dan
- b. kantor pelayanan pajak pratama kelompok II.

Pasal 65

Kantor pelayanan pajak pratama kelompok I terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V; dan
- j. Seksi Pengawasan VI.

Pasal 66

- (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan kepatuhan internal, manajemen kinerja pegawai, manajemen risiko, penyusunan laporan, dan pengelolaan dokumen, serta pemberian dukungan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak.
- (2) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan penjaminan kualitas data, pengelolaan penerimaan pajak, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, tindak lanjut atas distribusi data, penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan, pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan manajemen kinerja organisasi, serta pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pemberian layanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, pengelolaan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak, pengelolaan pelaporan wajib pajak, penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- (4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak, pendataan dan pengenaan wajib pajak dan objek pajak, pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.
- (5) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi, penguasaan wilayah, pengamatan potensi dan penguasaan informasi perpajakan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pelaksanaan kegiatan pengamatan, pelaksanaan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- (6) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi Pengawasan II pada kantor pelayanan pajak pratama kelompok I juga mempunyai tugas melakukan perencanaan, manajemen, administrasi, dan pelaporan kegiatan pengamatan.
- (7) Direktur Jenderal menetapkan pembagian wilayah kerja dan/atau objek dan jumlah seksi pengawasan.

Pasal 67

Kantor pelayanan pajak pratama kelompok II terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV; dan
- i. Seksi Pengawasan V.

Pasal 68

- (1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan kepatuhan

internal, manajemen kinerja pegawai, manajemen risiko, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, serta pemberian dukungan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak.

- (2) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan penjaminan kualitas data, pengelolaan penerimaan pajak, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, tindak lanjut atas distribusi data, penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan, pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, manajemen kinerja organisasi, serta pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pemberian layanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, pengelolaan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak, pengelolaan pelaporan wajib pajak, penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- (4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak, pendataan dan pengenaan wajib pajak dan objek pajak, pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.
- (5) Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi, penguasaan wilayah, pengamatan potensi dan penguasaan informasi perpajakan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pelaksanaan kegiatan pengamatan, pelaksanaan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- (6) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi Pengawasan II pada kantor pelayanan pajak pratama kelompok II juga mempunyai tugas melakukan perencanaan, manajemen, administrasi, dan pelaporan kegiatan pengamatan.
- (7) Direktur Jenderal menetapkan pembagian wilayah kerja dan/atau objek dan jumlah seksi pengawasan.

BAB V
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI
PERPAJAKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor pelayanan pajak pratama.
- (2) Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dipimpin oleh seorang kepala kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan.

Pasal 70

Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak pratama.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan dan pendaftaran wajib pajak;
- b. penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
- c. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;
- d. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data;
- e. pengamatan potensi perpajakan;
- f. penyajian informasi perpajakan;
- g. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan permohonan dan surat lainnya;
- h. pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- i. pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan administrasi kantor.

Pasal 72

Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan terdiri atas:

- a. jabatan fungsional; dan
- b. jabatan pelaksana.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 73

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal ditetapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (6) Tugas, jenis, jenjang, dan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Menteri menetapkan kedudukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 74

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), jabatan fungsional bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat fungsional atau pejabat struktural yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari pejabat fungsional, pejabat struktural, maupun pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 76

- (1) Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 78

Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Instansi Vertikal.

Pasal 79

Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan serta dengan instansi lainnya di luar Kementerian Keuangan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 80

Setiap pimpinan Instansi Vertikal secara berjenjang menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 81

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 84

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 30, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada kepala unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada kantor pusat dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada kantor pelayanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1), dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional bertanggung jawab kepada kepala unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada kantor pusat dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala kantor pelayanan pajak.

Pasal 85

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan kantor pelayanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 30, Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi atau pejabat terkait di lingkungan kantor maupun wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Unit organisasi/pejabat yang terkait wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

Pasal 86

- (1) Kepala bagian dan kepala bidang pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta kepala kantor pelayanan pajak mengolah laporan yang diterima dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan untuk

- menyusun laporan berkala dan disampaikan kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Kompilasi dan penyusunan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Umum menjadi laporan berkala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
 - (3) Laporan kepala kantor pelayanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompilasi dari laporan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dan kepala seksi pada kantor pelayanan pajak, serta kepala kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan di lingkungan kantor pelayanan pajak.
 - (4) Kompilasi dan penyusunan laporan kepala kantor pelayanan pajak dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
 - (5) Pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat atasannya.

BAB VIII

JUMLAH, NAMA, LOKASI, JENIS, KELOMPOK, WILAYAH KERJA, DAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 87

- (1) Instansi Vertikal terdiri atas:
 - a. 34 (tiga puluh empat) kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. 4 (empat) kantor pelayanan pajak wajib pajak besar;
 - c. 9 (sembilan) kantor pelayanan pajak khusus;
 - d. 38 (tiga puluh delapan) kantor pelayanan pajak madya;
 - e. 301 (tiga ratus satu) kantor pelayanan pajak pratama; dan
 - f. 204 (dua ratus empat) kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Nama, lokasi, jenis, kelompok, dan wilayah kerja dari kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak khusus, kantor pelayanan pajak madya, dan kantor pelayanan pajak pratama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Nama, lokasi, dan wilayah kerja dari kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal wajib pajak memiliki tempat kegiatan usaha dan/atau objek pajak di luar wilayah kerja kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar maka wilayah kerja kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar selain sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) juga meliputi tempat kegiatan usaha dan/atau objek pajak tersebut.
- (6) Bagan susunan organisasi Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX PEMBAGIAN WAJIB PAJAK

Pasal 88

- (1) Pembagian wajib pajak yang diadministrasikan pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak khusus, dan kantor pelayanan pajak madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembagian tempat administrasi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan beban kerja yang signifikan.
- (3) Penentuan kriteria dan/atau pemilihan wajib pajak yang diadministrasikan oleh kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak khusus, dan kantor pelayanan pajak madya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB X JABATAN

Pasal 89

- (1) Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala bagian dan kepala bidang pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, kepala kantor pelayanan pajak khusus, kepala kantor pelayanan pajak madya, dan kepala kantor pelayanan pajak pratama merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala subbagian dan kepala seksi pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala subbagian dan kepala seksi pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak khusus, kantor pelayanan pajak madya, dan kantor pelayanan pajak pratama merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Kepala kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XI PENATAAN ORGANISASI

Pasal 90

Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 91

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja eselon III ke bawah pada Instansi Vertikal, sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Salinan penetapan rincian tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Ketentuan mengenai penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang telah dilakukan sebelum saat mulai operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru serta diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Bagi pegawai di lingkungan Kementerian yang sedang dalam proses mutasi dan/atau promosi, tetap dapat dilakukan pengangkatan dan pelantikan dalam jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, diangkat dan dilantik dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 95

Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

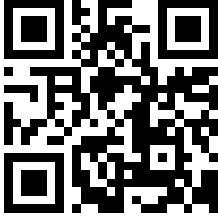
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961); dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
1.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR	Kota Jakarta	Seluruh Indonesia	1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu 2. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua 3. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga 4. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat
2.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS	Kota Jakarta	Seluruh Indonesia	1. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu 2. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua 3. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga 4. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat 5. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima 6. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam 7. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing 8. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi 9. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
3.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH	Kota Banda Aceh	Provinsi Aceh	1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen
				6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa
				7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapak Tuan
				8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam
				9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sigli
				10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sabang
				11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Lhoksukon
				12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Calang
				13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Suka Makmur
				14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Takengon
				15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rimba Raya
				16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Karang Baru
				17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Blangkejeran
				18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Blangpidie
				19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				<p>Sinabang</p> <p>20. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Aceh Singkil</p> <p>21. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kutacane</p>
4.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I	Kota Medan	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	<p>1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan</p> <p>2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan</p> <p>3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat</p> <p>4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan</p> <p>5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur</p> <p>6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia</p> <p>7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah</p> <p>8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai</p> <p>9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam</p>
5.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II	Kota Pematang Siantar	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	<p>1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi</p> <p>2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran</p> <p>3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat</p> <p>4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar</p> <p>5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan</p> <p>6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga</p> <p>7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige</p> <p>8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe</p> <p>9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai</p> <p>10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan</p>

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Konsultasi Perpajakan Kualuh Hulu 11. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kota Pinang 12. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Perdagangan 13. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Panyabungan 14. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sibuhuan 15. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pandan 16. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Gunung Sitoli 17. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Dolok Sanggul 18. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tarutung 19. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sidikalang
6.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU	Kota Pekanbaru	Provinsi Riau	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci 9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bagansiapiapi 10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tembilahan 11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Teluk Kuantan 12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri 13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Selat Panjang 14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pangarayan 15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Siak Sri Indrapura
7.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU	Kota Batam	Provinsi Kepulauan Riau	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan 7. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				<p>Ranai</p> <p>8. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Batu</p> <p>9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Dabo Singkep</p>
8.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI	Kota Padang	<p>1. Provinsi Sumatera Barat</p> <p>2. Provinsi Jambi</p>	<p>1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu</p> <p>2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua</p> <p>3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi</p> <p>4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok</p> <p>5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh</p> <p>6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura</p> <p>7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan</p> <p>8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo</p> <p>9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko</p> <p>10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal</p> <p>11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pariaman</p> <p>12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tua Pejat</p> <p>13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Painan</p> <p>14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Lubuk Basung</p> <p>15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Lubuk Sikaping</p>

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Padang Panjang
				17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Simpang Ampat
				18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kotabaru
				19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muaro Sijunjung
				20. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Padang Aro
				21. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sawahlunto
				22. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Batu Sangkar
				23. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sengeti
				24. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muara Bulian
				25. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rimbo Bujang
				26. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muara Tebo
				27. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sungai Penuh
				28. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Sarolangun 29. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muara Sabak
9.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Kota Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkal Pinang 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih 12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu 13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka 14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muaradua 15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Ogan Komering Ulu Timur 16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tugumulyo 17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Manggar

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pagar Alam 19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Empat Lawang 20. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Indralaya 21. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muara Enim 22. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pangkalan Balai 23. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muntok 24. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sungai Liat 25. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Toboali 26. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Koba
10.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	1. Provinsi Bengkulu 2. Provinsi Lampung	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandar Lampung 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi 7. Kantor Pelayanan Pajak

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Pratama Curup
				8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Satu
				9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua
				10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bandarjaya
				11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sukadana
				12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kalianda
				13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pringsewu
				14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Liwa
				15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Menggala
				16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Baradatu
				17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kepahiang
				18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muko-Muko
				19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Manna
				20. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bintuhan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
11.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT	Kota Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu 12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua 13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga 14. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu 15. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua 16. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran
12.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT	Kota Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Palmerah 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan
13.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN I	Kota Jakarta	Sebagian Kota Adm. Jakarta Selatan	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan I 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
14.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN II	Kota Jakarta	Sebagian Kota Adm. Jakarta Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan II 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pesanggrahan 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak
15.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR	Kota Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
16.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA UTARA	Kota Jakarta	1. Kota Adm. Jakarta Utara 2. Kabupaten Kepulauan Seribu	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit 9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kepulauan Seribu
17.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN	Kota Serang	Provinsi Banten	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang 12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa 13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Rangkas Bitung
18.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I	Kota Bandung	Sebagian Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya 12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis 13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut 14. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya 15. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang 16. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang 17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pelabuhan Ratu 18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Banjar
19.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II	Kab. Bekasi	Sebagian Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Selatan 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan 12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Majalengka
20.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT III	Kota Bogor	Sebagian Provinsi Jawa Barat	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bekasi 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
21.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I	Kota Semarang	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan
				5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat
				6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur
				7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan
				8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah
				9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga
				10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus
				11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati
				12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang
				13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora
				14. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak
				15. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara
				16. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari
				17. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari
				18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu
				19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Ungaran
				20. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rembang
				21. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal
				22. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Purwodadi
22.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II	Kota Surakarta	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung 13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Majenang 14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muntilan 15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sragen 16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Banjarnegara 17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Wonogiri 18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
23.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Kab. Sleman	Provinsi D.I. Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari
24.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I	Kota Surabaya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Surabaya 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut 12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang 13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
25.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II	Kab. Sidoarjo	Sebagian Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan 13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan 14. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi 15. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban 16. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo 17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Mojosari 18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sumenep 19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Caruban 20. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sampang 21. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Magetan 22. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pacitan
26.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III	Kota Malang	Sebagian Provinsi Jawa Timur	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar 12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen 13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare 14. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo 15. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bangil 17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kraksaan 18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Lumajang 19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				20. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Wlingi 21. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nganjuk 22. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso
27.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang 8. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bengkayang 9. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sambas 10. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Mempawah 11. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Ngabang 12. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sekadau 13. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Putussibau

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nangapinoh
28.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	Kota Banjarmasin	1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Kalimantan Tengah	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung 11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kuala Kurun 12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kuala Kapuas 13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pulang Pisau 14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kasongan 15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kuala Pembuang 16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nanga Bulik 17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Sukamara
				18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Buntok
				19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tamiang Layang
				20. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Puruk Cahu
				21. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Marabahan
				22. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari
				23. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Martapura
				24. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rantau
				25. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kandangan
				26. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kota Baru
				27. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Paringin
				28. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Amuntai

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
29.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	Kota Balikpapan	1. Provinsi Kalimantan Timur 2. Provinsi Kalimantan Utara	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Barat 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong 11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nunukan 12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sangatta 13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tanah Grogot 14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Selor 15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Malinau 16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sendawar

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
30.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA	Kota Makassar	1. Provinsi Sulawesi Selatan 2. Provinsi Sulawesi Barat 3. Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari 12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene 13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju 14. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka 15. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau 16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Enrekang 17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pinrang 18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sidrap 19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Malili 20. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Masamba

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				21. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Makale
				22. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Benteng
				23. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sinjai
				24. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bontosunggu
				25. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa
				26. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Takalar
				27. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Watansoppeng
				28. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sengkang
				29. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene
				30. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Unaaha
				31. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Polewali
				32. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Mamasa
				33. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Pasangkayu 34. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Lasusua 35. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rumbia 36. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Raha
31.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA	Kota Manado	1. Provinsi Sulawesi Utara 2. Provinsi Sulawesi Tengah 3. Provinsi Gorontalo 4. Provinsi Maluku Utara	1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Toli Toli 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate 11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo 12. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tomohon 13. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Limboto 14. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Marissa 15. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tilamuta

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				16. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tondano
				17. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Amurang
				18. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Talaud
				19. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Banawa
				20. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Parigi
				21. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Banggai
				22. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bungku
				23. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Buol
				24. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sanana
				25. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tidore
				26. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Labuha
				27. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Maba

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
32.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI	Kota Denpasar	Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan 9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kerobokan 10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Ubud 11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Amlapura 12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Negara
33.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA	Kota Mataram	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang 8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng 10. Kantor Pelayanan Pajak

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				Pratama Atambua
				11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu
				12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Gerung
				13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Dompu
				14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Taliwang
				15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Selong
				16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka
				17. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Baa
				18. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kalabahi
				19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bajawa
				20. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Labuan Bajo
				21. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Soe
				22. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Waikabubak

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
34.	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU	Kota Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Maluku 2. Provinsi Papua 3. Provinsi Papua Barat 4. Provinsi Papua Barat Daya 5. Provinsi Papua Pegunungan 6. Provinsi Papua Selatan 7. Provinsi Papua Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak 6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke 8. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Namlea 9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Masohi 10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Piru 11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bula 12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Dobo 13. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Langgur 14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Saumlaki 15. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Fakfak 16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Teminabuan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA	
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	NAMA KANTOR
				17. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kaimana
				18. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sarmi
				19. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Wamena
				20. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Serui
				21. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nabire
				22. Kantor Pelayanan, dan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bintuni

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2026
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA, LOKASI, JENIS, KELOMPOK, DAN WILAYAH KERJA
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR						
1.	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu	Kota Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
2.	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua	Kota Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
3.	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga	Kota Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
4.	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat	Kota Jakarta	Wajib Pajak Besar	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS						
5.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu	Kota Jakarta	Khusus	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
6.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua	Kota Jakarta	Khusus	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
7.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga	Kota Jakarta	Khusus	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
8.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat	Kota Jakarta	Khusus	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
9.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima	Kota Jakarta	Khusus	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
10.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam	Kota Jakarta	Khusus	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
11.	Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing	Kota Jakarta	Khusus	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
12.	Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi	Kota Jakarta	Khusus	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
13.	Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa	Kota Jakarta	Khusus	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH						
14.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Pratama (Kelompok I)	Kota Banda Aceh	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
15.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar	Kab. Aceh Besar	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Aceh Besar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Pidie	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kota Sabang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
16.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Lhokseumawe	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Aceh Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
17.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh	Kab. Aceh Barat	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Aceh Jaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Nagan Raya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Aceh Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
18.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen	Kab. Bireuen	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Bireuen	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Pidie Jaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Aceh Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Bener Meriah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
19.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa	Kota Langsa	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Langsa	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Aceh Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Aceh Tamiang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Gayo Lues	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
20.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapaktuan	Kab. Aceh Selatan	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Aceh Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Aceh Barat Daya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Simeulue	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				1. Kota	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
21.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam	Kota Subulussalam	Pratama (Kelompok II)	Subulussalam		
				2. Kab. Aceh Singkil	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Aceh Tenggara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I						
22.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan	Kota Medan	Madya	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
23.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan	Kota Medan	Madya	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
24.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	Kota Medan	Pratama (Kelompok I)	Kota Medan	1. Medan Barat	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Medan Kota	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Medan Area	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Medan Amplas	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Medan Denai	Seluruh Desa/Kelurahan
25.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	Kota Medan	Pratama (Kelompok I)	Kota Medan	1. Medan Belawan	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Medan Labuhan	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Medan Marelan	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Medan Deli	Seluruh Desa/Kelurahan
26.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Kota Medan	Pratama (Kelompok I)	Kota Medan	1. Medan Timur	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Medan Perjuangan	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Medan Tembung	Seluruh Desa/Kelurahan
27.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia	Kota Medan	Pratama (Kelompok I)	Kota Medan	1. Medan Polonia	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Medan Maimun	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					3. Medan Baru	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Medan Selayang	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Medan Tuntungan	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Medan Johor	Seluruh Desa/Kelurahan
28.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	Kota Medan	Pratama (Kelompok I)	Kota Medan	1. Medan Petisah	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Medan Sunggal	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Medan Helvetia	Seluruh Desa/Kelurahan
29.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	Kota Binjai	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Binjai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Langkat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
30.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	Kab. Deli Serdang	Pratama (Kelompok I)	Kab. Deli Serdang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II						
31.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Tebing Tinggi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Serdang Bedagai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
32.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran	Kab. Asahan	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Asahan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kota Tanjungbalai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Batu Bara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
33.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat	Kab. Labuhanbatu	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Labuhanbatu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				2. Kab. Labuhanbatu Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Labuhanbatu Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
34.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar	Kota Pematangsiantar	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Pematangsiantar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Simalungun	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
35.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan	Kota Padang-sidempuan	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Padang-sidempuan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Tapanuli Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Padang Lawas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Mandailing Natal	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Padang Lawas Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
36.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga	Kota Sibolga	Pratama (Kelompok II)	1. Kota Sibolga	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Tapanuli	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				Tengah		
				3. Kab. Nias	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Nias Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Nias Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				6. Kab. Nias Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				7. Kota Gunungsitoli	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
37.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige	Kab. Tapanuli Utara	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Samosir	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Toba	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Humbang Hasundutan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Tapanuli Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
38.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe	Kab. Karo	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Karo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Pakpak Bharat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Dairi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU						
39.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Madya	Provinsi Riau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
40.		Kota Pekanbaru		Kota Pekanbaru	1. Senapelan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan		Pratama (Kelompok I)		2. Pekanbaru Kota 3. Sail 4. Tenayan Raya 5. Rumbai 6. Rumbai Barat 7. Rumbai Timur 8. Lima Puluh 9. Kulim	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
41.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan	Kota Pekanbaru	Pratama (Kelompok I)	Kota Pekanbaru	1. Binawidya 2. Payung Sekaki 3. Marpoyan Damai 4. Bukit Raya 5. Sukajadi 6. Tuah Madani	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
42.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai	Kota Dumai	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Dumai 2. Kab. Rokan Hilir	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
43.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat	Kab. Indragiri Hulu	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Indragiri Hulu 2. Kab. Indragiri Hilir	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				3. Kab. Kuantan Singingi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
44.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	Kab. Bengkalis	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Bengkalis	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kepulauan Meranti	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
45.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	Kab. Kampar	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Kampar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Rokan Hulu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
46.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci	Kab. Pelalawan	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Pelalawan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Siak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU						
47.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam	Kota Batam	Madya	Provinsi Kepulauan Riau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
48.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Tanjung Pinang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Natuna	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Kepulauan Anambas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
49.		Kota Batam		Kota Batam	1. Belakang Padang	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara		Pratama (Kelompok I)		2. Batu Ampar 3. Sekupang 4. Nongsa 5. Galang 6. Lubuk Baja	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
50.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan	Kota Batam	Pratama (Kelompok I)	Kota Batam	1. Sei Beduk 2. Bulang 3. Bengkong 4. Batam Kota 5. Sagulung 6. Batu Aji	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
51.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun	Kab. Karimun	Pratama (Kelompok I)	Kab. Karimun	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
52.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan	Kab. Bintan	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Bintan 2. Kab. Lingga	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI						

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
53.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	Kota Padang	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Padang	1. Padang Barat	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Padang Utara	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Nanggalo	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Koto Tengah	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Kuranji	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kota Pariaman	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
3. Kab. Padang Pariaman	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan				
54.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	Kota Padang	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Padang	1. Padang Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Padang Timur	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Pauh	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Lubuk Begalung	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Lubuk Kilangan	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Bungus Teluk Kabung	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kepulauan Mentawai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Pesisir Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				1. Kota Bukittinggi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
55.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi	Kota Bukittinggi	Pratama (Kelompok I)	2. Kab. Agam	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Pasaman	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kota Padang Panjang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Pasaman Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				1. Kota Solok	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
56.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok	Kota Solok	Pratama (Kelompok I)	2. Kab. Solok	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Dharmasraya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Solok Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				6. Kota Sawahlunto	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				1. Kota Payakumbuh	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
57.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Pratama (Kelompok II)	2. Kab. Lima Puluh Kota	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Tanah Datar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				1. Kota Jambi	1. Pasar Jambi	Seluruh Desa/Kelurahan
58.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura	Kota Jambi	Pratama (Kelompok I)	2. Telanaipura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kota Baru	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Alam Barajo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Danau Sipin	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				2. Kab. Muaro Jambi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
59.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan	Kota Jambi	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Jambi	1. Jelutung	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Jambi Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Jambi Timur	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Paal Merah	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Pelayanan	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Danau Teluk	Seluruh Desa/Kelurahan
		2. Kab. Batang Hari	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan		
60.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo	Kab. Muara Bungo	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Bungo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Tebo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
61.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko	Kab. Merangin	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Merangin	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Sarolangun	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Kerinci	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kota Sungai Penuh	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
62.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal	Kab. Tanjung Jabung Barat	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Tanjung Jabung Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Tanjung Jabung Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG						
63.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang	Kota Palembang	Madya	Provinsi Sumatera Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
		Kota Palembang		Kota Palembang	1. Ilir Timur I	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
64.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur		Pratama (Kelompok I)		2. Ilir Timur II	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Ilir Timur III	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Kemuning	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Sako	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Kalidoni	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Sematang Borang	Seluruh Desa/Kelurahan
					65.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat
2. Ilir Barat II	Seluruh Desa/Kelurahan					
3. Bukit Kecil	Seluruh Desa/Kelurahan					
4. Gandus	Seluruh Desa/Kelurahan					
5. Sukarami	Seluruh Desa/Kelurahan					
6. Alang-Alang Lebar	Seluruh Desa/Kelurahan					
66.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	Kota Palembang	Pratama (Kelompok I)	Kota Palembang	1. Seberang Ulu I	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Jakabaring	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Seberang Ulu II	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Plaju	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Kertapati	Seluruh Desa/Kelurahan
67.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja	Kab. Ogan Komerling Ulu	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Ogan Komerling Ulu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Ogan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				Komering Ulu Timur		
68.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau	Kota Lubuk Linggau	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Lubuk Linggau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Musi Rawas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Musi Rawas Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
69.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Pratama (Kelompok I)	Kota Pangkal Pinang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
70.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan	Kab. Belitung	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Belitung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Belitung Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
71.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat	Kab. Lahat	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Lahat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kota Pagar Alam	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Empat Lawang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
72.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung	Kab. Ogan Komering Ilir	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Ogan Komering Ilir	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Ogan Ilir	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
73.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih	Kota Prabumulih	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Prabumulih	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Muara Enim	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				3. Kab. Penukal Abab Lematang Iilir	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
74.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu	Kab. Musi Banyuasin	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Musi Banyuasin	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Banyuasin	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
75.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka	Kab. Bangka	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Bangka	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Bangka Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Bangka Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Bangka Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG						
76.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Madya	Provinsi Lampung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
77.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro	Kota Metro	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Metro	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Lampung Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Lampung Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
78.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu	Kota Bandar Lampung	Pratama (Kelompok I)	Kota Bandar Lampung	1. Enggal	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Kedamaian	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Kemiling	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Langkapura	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					5. Tanjungkarang Barat	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Tanjungkarang Timur	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Tanjungkarang Pusat	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Telukbetung Barat	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Telukbetung Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan
					10. Telukbetung Timur	Seluruh Desa/Kelurahan
					11. Telukbetung Utara	Seluruh Desa/Kelurahan
79.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua	Kota Bandar Lampung	Pratama (Kelompok I)	Kota Bandar Lampung	1. Bumi Waras	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Kedaton	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Labuhan Ratu	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Panjang	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Rajabasa	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Sukabumi	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Sukarame	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Tanjung Senang	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Way Halim	Seluruh Desa/Kelurahan
80.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar	Kab. Lampung Selatan	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Lampung Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Pesawaran	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				3. Kab. Pringsewu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Tanggamus	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
81.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi	Kab. Lampung Utara	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Lampung Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Lampung Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Pesisir Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Tulang Bawang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Tulang Bawang Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				6. Kab. Mesuji	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				7. Kab. Way Kanan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
82.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup	Kab. Rejang Lebong	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Lebong	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Rejang Lebong	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Kepahiang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
83.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Satu	Kota Bengkulu	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Bengkulu	1. Ratu Samban	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Teluk Segara	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Muara Bangka Hulu	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Sungai Serut	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Bengkulu Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
3. Kab. Bengkulu Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan				

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				4. Kab. Muko- Muko	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
84.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua	Kota Bengkulu	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Bengkulu	1. Gading Cempaka	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Selebar	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Ratu Agung	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Kampung Melayu	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Singaran Pati	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Seluma	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Bengkulu Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Kaur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT						
85.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat	Kota Jakarta	Madya	Kota Adm. Jakarta Pusat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
86.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat	Kota Jakarta	Madya	Kota Adm. Jakarta Pusat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
87.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Menteng	Kebon Sirih
88.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Menteng	1. Menteng
						2. Pegangsaan
						3. Cikini

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
89.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Menteng	Gondangdia
90.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Tanah Abang	Karet Tengsin
91.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Tanah Abang	1. Petamburan
						2. Kebon Melati
						3. Kebon Kacang
						4. Kampung Bali
92.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Tanah Abang	1. Bendungan Hilir
						2. Gelora
93.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Senen	Seluruh Desa/Kelurahan
94.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Cempaka Putih	Seluruh Desa/Kelurahan
					Johar Baru	Seluruh Desa/Kelurahan
95.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Gambir	1. Gambir
						2. Kebon Kelapa
96.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Gambir	1. Cideng
						2. Petojo Selatan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
	Dua					
97.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Gambir	1. Duri Pulo 2. Petojo Utara
98.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Sawah Besar	1. Gunung Sahari Utara 2. Mangga Dua Selatan
99.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Sawah Besar	1. Pasar Baru 2. Kartini 3. Karang Anyar
100.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Pusat	Kemayoran	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT						
101.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat	Kota Jakarta	Madya	Kota Adm. Jakarta Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
102.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat	Kota Jakarta	Madya	Kota Adm. Jakarta Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
103.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Barat	Palmerah	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
104.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Barat	Taman Sari	Seluruh Desa/Kelurahan
105.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Barat	Tambora	Seluruh Desa/Kelurahan
106.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Barat	Cengkareng	Seluruh Desa/Kelurahan
107.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Barat	Kebon Jeruk	1. Sukabumi Selatan
						2. Sukabumi Utara
						3. Kelapa Dua
						4. Kebon Jeruk
108.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Barat	Kebon Jeruk	1. Duri Kepa
						2. Kedoya Selatan
						3. Kedoya Utara
109.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Barat	Grogol Petamburan	Seluruh Desa/Kelurahan
110.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Barat	Kalideres	Seluruh Desa/Kelurahan
111.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Barat	Kembangan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN I						
112.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I	Kota Jakarta	Madya	Sebagian Kota Adm. Jakarta Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
113.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan I	Kota Jakarta	Madya	Sebagian Kota Adm. Jakarta Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
114.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Setiabudi	1. Karet 2. Karet Kuningan
115.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Setiabudi	1. Setia Budi 2. Guntur 3. Pasar Manggis 4. Menteng Atas
116.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Setiabudi	1. Karet Semanggi 2. Kuningan Timur
117.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Mampang Prapatan	Seluruh Desa/Kelurahan
118.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Tebet	Seluruh Desa/Kelurahan
119.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Pancoran	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN II						
120.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II	Kota Jakarta	Madya	Sebagian Kota Adm. Jakarta Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
121.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan II	Kota Jakarta	Madya	Sebagian Kota Adm. Jakarta Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
122.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	1. Senayan 2. Selong 3. Rawa Barat 4. Petogogan 5. Gunung
123.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	1. Gandaria Utara 2. Cipete Utara 3. Pulo 4. Kramat Pela 5. Melawai
124.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Kebayoran Lama	Seluruh Desa/Kelurahan
125.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pesanggrahan	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Pesanggrahan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
126.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Pasar Minggu	Seluruh Desa/Kelurahan
127.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Jagakarsa	Seluruh Desa/Kelurahan
128.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Selatan	Cilandak	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR						
129.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur	Kota Jakarta	Madya	Kota Adm. Jakarta Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
130.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur	Kota Jakarta	Madya	Kota Adm. Jakarta Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
131.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Timur	Matraman	Seluruh Desa/Kelurahan
132.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Timur	Jatinegara	Seluruh Desa/Kelurahan
133.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Timur	Pulogadung	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
134.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Timur	Cakung	Seluruh Desa/Kelurahan
135.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Timur	1. Kramat Jati	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Makasar	Seluruh Desa/Kelurahan
136.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Timur	Duren Sawit	Seluruh Desa/Kelurahan
137.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Timur	1. Pasar Rebo	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Cipayung	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Ciracas	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA UTARA						
138.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara	Kota Jakarta	Madya	Kota Adm. Jakarta Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
139.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara	Kota Jakarta	Madya	Kota Adm. Jakarta Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
140.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Utara	Penjaringan	1. Penjaringan
						2. Pejagalan
141.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Utara	Tanjung Priok	Seluruh Kelurahan
142.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Utara	Kelapa Gading	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
143.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Adm. Jakarta Utara	Pademangan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
144.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Utara	1. Koja	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Cilincing	Seluruh Desa/Kelurahan
145.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit	Kota Jakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Adm. Jakarta Utara	Penjaringan	1. Pluit
						2. Kamal Muara
						3. Kapuk Muara
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN						
146.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang	Kota Tangerang	Madya	Provinsi Banten	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
147.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang	Kab. Tangerang	Madya	Provinsi Banten	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
148.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat	Kota Serang	Pratama (Kelompok I)	Kota Serang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
149.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Timur	Kab. Serang	Pratama (Kelompok I)	Kab. Serang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
150.		Kota Tangerang		Kota Tangerang	1. Benda	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat		Pratama (Kelompok I)		2. Karawaci 3. Cibodas 4. Jatiuwung 5. Periuk 6. Neglasari	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
151.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur	Kota Tangerang	Pratama (Kelompok I)	Kota Tangerang	1. Ciledug 2. Larangan 3. Karang Tengah 4. Cipondoh 5. Pinang 6. Tangerang 7. Batuceper	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
152.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong	Kota Tangerang Selatan	Pratama (Kelompok I)	Kota Tangerang Selatan	1. Serpong 2. Serpong Utara 3. Setu	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
153.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan	Pratama (Kelompok I)	Kota Tangerang Selatan	1. Pondok Aren 2. Ciputat 3. Ciputat Timur 4. Pamulang	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
154.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon	Kota Cilegon	Pratama (Kelompok I)	Kota Cilegon	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
155.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi	Kab. Tangerang	Pratama (Kelompok I)	Kab. Tangerang	1. Kosambi 2. Sindang Jaya	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					3. Rajeg	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Mauk	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Sukadiri	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Pakuhaji	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Sepatan	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Sepatan Timur	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Teluknaga	Seluruh Desa/Kelurahan
					10. Pasar Kemis	Seluruh Desa/Kelurahan
					11. Kemiri	Seluruh Desa/Kelurahan
					12. Mekar Baru	Seluruh Desa/Kelurahan
					13. Gunung Kaler	Seluruh Desa/Kelurahan
					14. Kronjo	Seluruh Desa/Kelurahan
					15. Kresek	Seluruh Desa/Kelurahan
					16. Sukamulya	Seluruh Desa/Kelurahan
156.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang	Kab. Pandeglang	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Pandeglang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Lebak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
157.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa	Kab. Tangerang	Pratama (Kelompok I)	Kab. Tangerang	1. Tigaraksa	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Solear	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Balaraja	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Jayanti	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Cisoka	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Cikupa	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Cisauk	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Curug	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Jambe	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					10. Kelapa Dua 11. Legok 12. Pagedangan 13. Panongan	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I						
158.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung	Kota Bandung	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
159.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung	Kota Bandung	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
160.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi	Kota Sukabumi	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Sukabumi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Sukabumi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
161.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur	Kab. Cianjur	Pratama (Kelompok I)	Kab. Cianjur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
162.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta	Kab. Purwakarta	Pratama (Kelompok I)	Kab. Purwakarta	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
163.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi	Kota Cimahi	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Cimahi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Bandung Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
164.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	Kota Bandung	Pratama (Kelompok I)	Kota Bandung	1. Astana Anyar	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Bojongloa Kaler	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Babakan Ciparay	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Bojongloa Kidul	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Bandung Kulon	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Lengkong	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					7. Bandung Kidul	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Batununggal	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Regol	Seluruh Desa/Kelurahan
165.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying	Kota Bandung	Pratama (Kelompok I)	Kota Bandung	1. Cibeunying Kaler	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Cidadap	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Coblong	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Sumur Bandung	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Bandung Wetan	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Cibeunying Kidul	Seluruh Desa/Kelurahan
166.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara	Kota Bandung	Pratama (Kelompok I)	Kota Bandung	1. Andir	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Cicendo	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Sukasari	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Sukajadi	Seluruh Desa/Kelurahan
167.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas	Kota Bandung	Pratama (Kelompok I)	Kota Bandung	1. Arcamanik	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Cibiru	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Antapani	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Ujungberung	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Cinambo	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Rancasari	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Buahbatu	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Mandalajati	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Gedebage	Seluruh Desa/Kelurahan
					10. Penyileukan	Seluruh Desa/Kelurahan
					11. Kiaracondong	Seluruh Desa/Kelurahan
168.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya	Kab. Tasikmalaya	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Tasikmalaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				2. Kab. Tasikmalaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
169.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis	Kab. Ciamis	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Ciamis	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Pangandaran	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kota Banjar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
170.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut	Kab. Garut	Pratama (Kelompok I)	Kab. Garut	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
171.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya	Kab. Bandung	Pratama (Kelompok I)	Kab. Bandung	1. Majalaya	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Cimenyan	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Cilengkrang	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Cileunyi	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Bojongsoang	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Rancaekek	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Ciparay	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Solokanjeruk	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Kertasari	Seluruh Desa/Kelurahan
					10. Paseh	Seluruh Desa/Kelurahan
					11. Cikancung	Seluruh Desa/Kelurahan
					12. Cicalengka	Seluruh Desa/Kelurahan
					13. Nagreg	Seluruh Desa/Kelurahan
					14. Pacet	Seluruh Desa/Kelurahan
15. Ibum	Seluruh Desa/Kelurahan					

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
172.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang	Kab. Bandung	Pratama (Kelompok I)	Kab. Bandung	1. Soreang	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Margaasih	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Margahayu	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Dayeuhkolot	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Katapang	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Baleendah	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Pameungpeuk	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Arjasari	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Banjaran	Seluruh Desa/Kelurahan
					10. Cimaung	Seluruh Desa/Kelurahan
					11. Pangalengan	Seluruh Desa/Kelurahan
					12. Pasirjambu	Seluruh Desa/Kelurahan
					13. Rancabali	Seluruh Desa/Kelurahan
					14. Ciwidey	Seluruh Desa/Kelurahan
					15. Cangkuang	Seluruh Desa/Kelurahan
					16. Kutawaringin	Seluruh Desa/Kelurahan
173.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang	Kab. Sumedang	Pratama (Kelompok I)	Kab. Sumedang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II						
174.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi	Kota Bekasi	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
175.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang	Kab. Karawang	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
176.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan	Kab. Bekasi	Pratama (Kelompok I)	Kab. Bekasi	1. Cikarang Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Cikarang Pusat	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					3. Cibarusah	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Bojongmangu	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Cikarang Barat	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Serang Baru	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Setu	Seluruh Desa/Kelurahan
177.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara	Kab. Bekasi	Pratama (Kelompok I)	Kab. Bekasi	1. Cikarang Timur	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Cikarang Utara	Seluruh Deda/Kelurahan
					3. Kedung Waringin	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Karang Bahagia	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Sukatani	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Sukakarya	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Pebayuran	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Cabangbungin	Seluruh Desa/Kelurahan
178.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung	Kab. Bekasi	Pratama (Kelompok I)	Kab. Bekasi	1. Cibitung	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Tambun Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Tambun Utara	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Tarumajaya	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Babelan	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Sukawangi	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Muaragembong	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Tambelang	Seluruh Desa/Kelurahan
179.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang	Kab. Karawang	Pratama (Kelompok I)	Kab. Karawang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
180.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang	Kab. Subang	Pratama (Kelompok I)	Kab. Subang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
181.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu	Kab. Indramayu	Pratama (Kelompok I)	Kab. Indramayu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
182.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu	Kota Cirebon	Pratama (Kelompok I)	Kota Cirebon	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
183.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua	Kab. Cirebon	Pratama (Kelompok I)	Kab. Cirebon	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
184.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan	Kab. Kuningan	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Kuningan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Majalengka	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT III						
185.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor	Kota Bogor	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
186.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bekasi	Kota Bekasi	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
187.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede	Kota Bekasi	Pratama (Kelompok I)	Kota Bekasi	1. Pondokgede	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Jatisampurna	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Jatiasih	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Pondokmelati	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Bantargebang	Seluruh Desa/Kelurahan
188.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat	Kota Bekasi	Pratama (Kelompok I)	Kota Bekasi	1. Bekasi Barat	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Medansatria	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Bekasi Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
189.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara	Kota Bekasi	Pratama (Kelompok I)	Kota Bekasi	1. Bekasi Utara	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Bekasi Timur	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Rawalumbu	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Mustikajaya	Seluruh Desa/Kelurahan
190.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan	Kota Depok	Pratama (Kelompok I)	Kota Depok	1. Sawangan	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Bojongsari	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Pancoran Mas	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Beji	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Limo	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Cinere	Seluruh Desa/Kelurahan
191.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis	Kota Depok	Pratama (Kelompok I)	Kota Depok	1. Cimanggis	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Tapos	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Cilodong	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Sukmajaya	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Cipayung	Seluruh Desa/Kelurahan
192.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong	Kab. Bogor	Pratama (Kelompok I)	Kab. Bogor	1. Cibinong	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Bojong Gede	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Ciseeng	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Gunung Putri	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Gunung Sindur	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Kemang	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Parung	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Parung Panjang	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Ranca Bungur	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					10.Rumpin 11.Tajurhalang	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
193.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi	Kab. Bogor	Pratama (Kelompok I)	Kab. Bogor	1. Ciawi	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Babakan Madang	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Caringin	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Ciampea	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Cibungbulang	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Cigombong	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Cigudeg	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Cijeruk	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Ciomas	Seluruh Desa/Kelurahan
					10.Cisarua	Seluruh Desa/Kelurahan
					11.Dramaga	Seluruh Desa/Kelurahan
					12.Jasinga	Seluruh Desa/Kelurahan
					13.Leuwiliang	Seluruh Desa/Kelurahan
					14.Leuwisadeng	Seluruh Desa/Kelurahan
					15.Megamendung	Seluruh Desa/Kelurahan
					16.Nanggung	Seluruh Desa/Kelurahan
					17.Pamijahan	Seluruh Desa/Kelurahan
					18.Sukajaya	Seluruh Desa/Kelurahan
					19.Sukaraja	Seluruh Desa/Kelurahan
					20.Tamansari	Seluruh Desa/Kelurahan
					21.Tenjo	Seluruh Desa/Kelurahan
					22.Tenjolaya	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
194.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi		Pratama (Kelompok I)		2. Cariu	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Jonggol	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Klapanunggal	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Sukamakmur	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Tanjungsari	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Citeureup	Seluruh Desa/Kelurahan
					195.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I						
196.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang	Kota Semarang	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
197.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang	Kota Semarang	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
198.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal	Kota Tegal	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Tegal	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Tegal	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Brebes	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
199.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan	Kota Pekalongan	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Pekalongan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Pekalongan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Pemasang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
200.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat	Kota Semarang	Pratama (Kelompok I)	Kota Semarang	1. Semarang Barat	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Ngaliyan	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Tugu	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Mijen	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Gunungpati	Seluruh Desa/Kelurahan
		Kota Semarang		Kota Semarang	1. Semarang Timur	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
201.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur		Pratama (Kelompok I)		2. Semarang Utara	Seluruh Desa/Kelurahan
202.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan	Kota Semarang	Pratama (Kelompok I)	Kota Semarang	Semarang Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan
203.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah	Kota Semarang	Pratama (Kelompok I)	Kota Semarang	Semarang Tengah	Seluruh Desa/Kelurahan
204.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga	Kota Salatiga	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Salatiga	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Semarang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
205.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus	Kab. Kudus	Pratama (Kelompok I)	Kab. Kudus	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
206.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati	Kab. Pati	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Pati	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Rembang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
207.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang	Kab. Batang	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Batang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kendal	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
208.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora	Kab. Blora	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Blora	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Grobogan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
209.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak	Kab. Demak	Pratama (Kelompok I)	Kab. Demak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
210.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara	Kab. Jepara	Pratama (Kelompok I)	Kab. Jepara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
211.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari	Kota Semarang	Pratama (Kelompok I)	Kota Semarang	1. Candisari	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Gajahmungkur	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Tembalang	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Banyumanik	Seluruh Desa/Kelurahan
212.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari	Kota Semarang	Pratama (Kelompok I)	Kota Semarang	1. Gayamsari	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Genuk	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Pedurungan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II						
213.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta	Kota Surakarta	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
214.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto	Kab. Banyumas	Pratama (Kelompok I)	Kab. Banyumas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
215.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap	Kab. Cilacap	Pratama (Kelompok I)	Kab. Cilacap	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
216.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen	Kab. Kebumen	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Kebumen	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Purworejo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
217.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang	Kota Magelang	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Magelang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Magelang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
218.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten	Kab. Klaten	Pratama (Kelompok I)	Kab. Klaten	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
219.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta	Kota Surakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Surakarta	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
220.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali	Kab. Boyolali	Pratama (Kelompok I)	Kab. Boyolali	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
221.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar	Kab. Karanganyar	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Karanganyar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Sragen	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
222.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Purbalingga	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Banjarnegara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
223.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Sukoharjo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Wonogiri	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
224.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	Kab. Temanggung	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Temanggung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Wonosobo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA						
225.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Pratama (Kelompok I)	Kota Yogyakarta	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
226.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul	Kab. Bantul	Pratama (Kelompok I)	Kab. Bantul	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
227.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman	Kab. Sleman	Pratama (Kelompok I)	Kab. Sleman	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
228.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates	Kab. Kulon Progo	Pratama (Kelompok I)	Kab. Kulon Progo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
229.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari	Kab. Gunungkidul	Pratama (Kelompok I)	Kab. Gunungkidul	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I						
230.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya	Kota Surabaya	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
231.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Surabaya	Kota Surabaya	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
232.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	1. Sukomanunggal	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Tandes	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Benowo	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Lakarsanti	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Pakal	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Sambikerep	Seluruh Desa/Kelurahan
233.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	Krembangan	Seluruh Desa/Kelurahan
234.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	Pabean Cantikan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
	Cantikan					
235.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	1. Gubeng 2. Sukolilo	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
236.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	Tegalsari	Seluruh Desa/Kelurahan
237.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	1. Sawahan 2. Asem Rowo 3. Bubutan	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
238.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	1. Wonocolo 2. Jambangan 3. Gayungan 4. Wonokromo	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
239.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	Genteng	Seluruh Desa/Kelurahan
240.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	1. Rungkut 2. Gunung Anyar 3. Tenggilis Mejoyo	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
241.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	1. Karangpilang 2. Wiyung 3. Dukuh Pakis	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
242.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo	Kota Surabaya	Pratama (Kelompok I)	Kota Surabaya	1. Mulyorejo	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Tambaksari	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Kenjeran	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Bulak	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Simokerto	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Semampir	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II						
243.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
244.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik	Kab. Gresik	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
245.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	Pratama (Kelompok I)	Kab. Bojonegoro	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
246.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto	Kota Mojokerto	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Mojokerto	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Mojokerto	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
247.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang	Kab. Jombang	Pratama (Kelompok I)	Kab. Jombang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
248.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat	Kab. Sidoarjo	Pratama (Kelompok I)	Kab. Sidoarjo	1. Taman	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Sukodono	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Krian	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Balongbendo	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Wonoayu	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Tarik	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					7. Prambon	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Tulangan	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Krembung	Seluruh Desa/Kelurahan
249.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan	Kab. Sidoarjo	Pratama (Kelompok I)	Kab. Sidoarjo	1. Sidoarjo	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Candi	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Tanggulangin	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Porong	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Jabon	Seluruh Desa/Kelurahan
250.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara	Kab. Sidoarjo	Pratama (Kelompok I)	Kab. Sidoarjo	1. Waru	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Sedati	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Gedangan	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Buduran	Seluruh Desa/Kelurahan
251.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan	Kab. Pamekasan	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Pamekasan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Sumenep	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
252.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik	Kab. Gresik	Pratama (Kelompok I)	Kab. Gresik	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
253.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun	Kota Madiun	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Madiun	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Madiun	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
254.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan	Kab. Bangkalan	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Bangkalan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Sampang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
255.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan	Kab. Lamongan	Pratama (Kelompok I)	Kab. Lamongan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
256.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi	Kab. Ngawi	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Ngawi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Magetan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
257.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban	Kab. Tuban	Pratama (Kelompok I)	Kab. Tuban	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
258.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo	Kab. Ponorogo	Pratama (Kelompok I)	Kab. Ponorogo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				Kab. Pacitan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III						
259.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang	Kota Malang	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
260.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri	Kota Kediri	Pratama (Kelompok I)	Kota Kediri	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
261.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan	Kota Malang	Pratama (Kelompok I)	Kota Malang	1. Klojen	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Sukun	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Kedungkandang	Seluruh Desa/Kelurahan
262.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	Kota Malang	Pratama (Kelompok I)	Kota Malang	1. Lowokwaru	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Blimbing	Seluruh Desa/Kelurahan
263.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu	Kota Batu	Pratama (Kelompok I)	Kota Batu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
264.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan	Kota Pasuruan	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Pasuruan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Pasuruan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				1. Kota Probolinggo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
265.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo	Kota Probolinggo	Pratama (Kelompok I)	2. Kab. Probolinggo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Lumajang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
266.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember	Kab. Jember	Pratama (Kelompok I)	Kab. Jember	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
267.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	Pratama (Kelompok I)	Kab. Banyuwangi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
268.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung	Kab. Tulungagung	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Tulungagung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Trenggalek	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
269.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar	Kota Blitar	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Blitar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Blitar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
270.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen	Kab. Malang	Pratama (Kelompok I)	Kab. Malang	1. Kepanjen	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Wajak	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Turen	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Gondanglegi	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Dampit	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Tirtoyudo	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Sumbermanjing Wetan	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Ampelgading	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Gedangan	Seluruh Desa/Kelurahan
					10. Bantur	Seluruh Desa/Kelurahan
					11. Pagak	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					12. Pagelaran	Seluruh Desa/Kelurahan
					13. Donomulyo	Seluruh Desa/Kelurahan
					14. Kalipare	Seluruh Desa/Kelurahan
					15. Sumberpucung	Seluruh Desa/Kelurahan
					16. Kromengan	Seluruh Desa/Kelurahan
					17. Ngajum	Seluruh Desa/Kelurahan
					18. Wonosari	Seluruh Desa/Kelurahan
					19. Bululawang	Seluruh Desa/Kelurahan
					20. Pakisaji	Seluruh Desa/Kelurahan
					21. Wagir	Seluruh Desa/Kelurahan
271.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare	Kab. Kediri	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Kediri	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Nganjuk	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
272.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Situbondo	Kab. Situbondo	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Situbondo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Bondowoso	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
273.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari	Kab. Malang	Pratama (Kelompok I)	Kab. Malang	1. Singosari	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Poncokusumo	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Jabung	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Lawang	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Tumpang	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Karang Ploso	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Dau	Seluruh Desa/Kelurahan
					8. Ngantang	Seluruh Desa/Kelurahan
					9. Kasembon	Seluruh Desa/Kelurahan
					10. Pakis	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					11. Tajinan 12. Pujon	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT						
274.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat	Kota Pontianak	Pratama (Kelompok I)	Kota Pontianak	1. Pontianak Kota	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Pontianak Barat	Seluruh Desa/Kelurahan
275.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur	Kota Pontianak	Pratama (Kelompok I)	Kota Pontianak	1. Pontianak Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Pontianak Tenggara	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Pontianak Timur	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Pontianak Utara	Seluruh Desa/Kelurahan
276.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang	Kota Singkawang	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Singkawang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Bengkayang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Sambas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
277.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang	Kab. Ketapang	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Ketapang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kayong Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
278.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya	Kab. Kubu Raya	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Kubu Raya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Mempawah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
279.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau	Kab. Sanggau	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Sanggau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Landak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Sekadau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
280.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang	Kab. Sintang	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Sintang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kapuas Hulu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Melawi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH						
281.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Madya	Provinsi Kalimantan Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
282.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya	Kota Palangkaraya	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Palangkaraya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Gunung Mas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Kapuas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Pulang Pisau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
283.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit	Kab. Kotawaringin Timur	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Kotawaringin Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Katingan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Seruyan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
284.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun		Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Kotawaringin	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
		Kab. Kotawaringin Barat		Barat		
				2. Kab. Lamandau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Sukamara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
285.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh	Kab. Barito Utara	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Barito Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Barito Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Barito Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Murung Raya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa
286.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Banjarmasin	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Barito Kuala	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
287.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Banjarbaru	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Tanah Laut	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Banjar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
288.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai	Kab. Hulu Sungai Tengah	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Hulu Sungai Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Tapin	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Hulu Sungai Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
289.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin	Kab. Tanah Bumbu	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Tanah Bumbu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kotabaru	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
		Kab. Tabalong		1. Kab. Tabalong	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
290.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung		Pratama (Kelompok I)	2. Kab. Balangan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Hulu Sungai Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA						
291.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan	Kota Balikpapan	Madya	Provinsi Kalimantan Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
292.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Barat	Kota Balikpapan	Pratama (Kelompok I)	Kota Balikpapan	1. Balikpapan Barat	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Balikpapan Tengah	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Balikpapan Kota	Seluruh Desa/Kelurahan
293.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur	Kota Balikpapan	Pratama (Kelompok I)	Kota Balikpapan	1. Balikpapan Timur	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Balikpapan Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Balikpapan Utara	Seluruh Desa/Kelurahan
294.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir	Kota Samarinda	Pratama (Kelompok I)	Kota Samarinda	1. Samarinda Ilir	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Samarinda Kota	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Samarinda Utara	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Sungai Pinang	Seluruh Desa/Kelurahan
					5. Sambutan	Seluruh Desa/Kelurahan
295.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu	Kota Samarinda	Pratama (Kelompok I)	Kota Samarinda	1. Samarinda Ulu	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Samarinda Seberang	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Sungai Kunjang	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Loa Janan Ilir	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					5. Palaran	Seluruh Desa/Kelurahan
296.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan	Kota Tarakan	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Tarakan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Nunukan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
297.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang	Kota Bontang	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Bontang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kutai Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
298.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam	Kab. Penajam Paser Utara	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Penajam Paser Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Paser	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
299.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb	Kab. Berau	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Berau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Bulungan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Tana Tidung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Malinau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
300.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong	Kab. Kutai Kartanegara	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Kutai Kartanegara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kutai Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Mahakam Ulu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA						
301.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar	Kota Makassar	Madya	Provinsi Sulawesi Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
302.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	Kota Makassar	Pratama (Kelompok I)	Kota Makassar	1. Wajo	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Ujung Tanah	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Kepulauan Sangkarrang	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Tallo	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
					5. Bontoala	Seluruh Desa/Kelurahan
					6. Biringkanaya	Seluruh Desa/Kelurahan
					7. Tamalanrea	Seluruh Desa/Kelurahan
303.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	Kota Makassar	Pratama (Kelompok I)	Kota Makassar	1. Tamalate	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Mamajang	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Mariso	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Ujung Pandang	Seluruh Desa/Kelurahan
304.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan	Kota Makassar	Pratama (Kelompok I)	Kota Makassar	1. Panakkukang	Seluruh Desa/Kelurahan
					2. Manggala	Seluruh Desa/Kelurahan
					3. Rappocini	Seluruh Desa/Kelurahan
					4. Makassar	Seluruh Desa/Kelurahan
305.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare	Kota Parepare	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Parepare	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Barru	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Enrekang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Sidenreng Rappang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
306.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo	Kota Palopo	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Palopo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Luwu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Luwu Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Luwu Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Tana Toraja	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				6. Kab. Toraja Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
307.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba	Kab. Bulukumba	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Bulukumba	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kepulauan Selayar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Sinjai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
308.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng	Kab. Bantaeng	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Bantaeng	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Jeneponto	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Gowa	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Takalar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
309.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone	Kab. Bone	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Bone	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Soppeng	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Wajo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
310.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros	Kab. Maros	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Maros	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Pangkajene Kepulauan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
311.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari	Kota Kendari	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Kendari	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Konawe Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Konawe Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Konawe	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Konawe Kepulauan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
312.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene	Kab. Majene	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Majene	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Polewali	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				Mandar		
313.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju	Kab. Mamuju	Pratama (Kelompok I)	3. Kab. Mamasa	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				1. Kab. Mamuju	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Mamuju Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Pasangkayu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
314.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka	Kab. Kolaka	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Kolaka	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kolaka Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Kolaka Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Bombana	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
315.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau	Kota Bau Bau	Pratama (Kelompok II)	1. Kota Baubau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Buton	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Buton Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Buton Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Buton Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				6. Kab. Wakatobi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				7. Kab. Muna	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				8. Kab. Muna Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA						
316.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Kota Manado	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Manado	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kota Tomohon	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
317.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo	Kota Gorontalo	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Gorontalo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Gorontalo Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Bone Bolango	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Gorontalo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Pohuwato	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				6. Kab. Boalemo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
318.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	Kota Bitung	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Bitung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Minahasa Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Minahasa	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
319.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Kotamobagu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Bolaang Mongondow	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Bolaang Mongondow Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Bolaang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				Mongondow Timur		
				6. Kab. Minahasa Tenggara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				7. Kab. Minahasa Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
320.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna	Kab. Kepulauan Sangihe	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Kepulauan Sangihe	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Kepulauan Talaud	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
321.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu	Kota Palu	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Palu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Sigi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Donggala	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Parigi Moutong	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
322.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk	Kab. Banggai	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Banggai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Banggai Kepulauan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Banggai Laut	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
323.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso	Kab. Morowali	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Morowali	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Morowali	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				Utara		
				3. Kab. Poso	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Tojo Una Una	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
324.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Toli Toli	Kab. Toli Toli	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Toli Toli	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Buol	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
325.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate	Kota Ternate	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Ternate	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Halmahera Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Kepulauan Sula	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Pulau Taliabu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kota Tidore Kepulauan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				6. Kab. Halmahera Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
326.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo	Kab. Halmahera Utara	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Halmahera Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Halmahera Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Pulau Morotai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Halmahera Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI						

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
327.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar	Kota Denpasar	Madya	Provinsi Bali	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
328.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat	Kota Denpasar	Pratama (Kelompok I)	Kota Denpasar	1. Denpasar Barat 2. Denpasar Utara	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
329.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Kota Denpasar	Pratama (Kelompok I)	Kota Denpasar	1. Denpasar Timur 2. Denpasar Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
330.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja	Kab. Buleleng	Pratama (Kelompok I)	Kab. Buleleng	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
331.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan	Kab. Badung	Pratama (Kelompok I)	Kab. Badung	1. Kuta 2. Kuta Selatan	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
332.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara	Kab. Badung	Pratama (Kelompok I)	Kab. Badung	1. Mengwi 2. Abiansemal 3. Petang 4. Kuta Utara	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
333.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar	Kab. Gianyar	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Bangli 2. Kab. Klungkung 3. Kab. Gianyar 4. Kab. Karangasem	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
334.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan	Kab. Tabanan	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Tabanan 2. Kab. Jembrana	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA						
335.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat	Kota Mataram	Pratama (Kelompok I)	Kota Mataram	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
336.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur	Kab. Lombok Barat	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Lombok Barat 2. Kab. Lombok	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				Utara		
337.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima	Kab. Bima	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Bima	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Bima	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Dompu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
338.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar	Kab. Sumbawa	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Sumbawa	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Sumbawa Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
339.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya	Kab. Lombok Tengah	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Lombok Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Lombok Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
340.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere	Kab. Sikka	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Sikka	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Lembata	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Flores Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
341.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang	Kota Kupang	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Kupang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Kupang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Sabu Raijua	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Rote Ndao	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Alor	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
342.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende	Kab. Ende	Pratama (Kelompok II)	1. Kab. Ende	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Nagekeo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Ngada	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
343.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng	Kab. Manggarai Barat	Pratama (Kelompok I)	1. Kab. Manggarai Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Manggarai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA					
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN			
				Timur					
344.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua	Kab. Belu	Pratama (Kelompok II)	3. Kab. Manggarai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan			
				1. Kab. Belu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan			
				2. Kab. Malaka	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan			
				3. Kab. Timor Tengah Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan			
345.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu	Kab. Sumba Timur	Pratama (Kelompok II)	4. Kab. Timor Tengah Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan			
				1. Kab. Sumba Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan			
				2. Kab. Sumba Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan			
				3. Kab. Sumba Barat Daya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan			
346.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon	Kota Ambon	Pratama (Kelompok I)	4. Kab. Sumba Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan			
				Provinsi Maluku	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan			
				KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU					
				347.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong	Kota Sorong	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Sorong	Seluruh Kecamatan
2. Kab. Sorong	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan							
3. Kab. Sorong Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan							
4. Kab. Maybrat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan							
5. Kab. Raja Ampat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan							
6. Kab. Tambrau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan							
7. Kab. Fak Fak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan							

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
				8. Kab. Kaimana	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
348.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura	Kota Jayapura	Pratama (Kelompok I)	1. Kota Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Kab. Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Keerom	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Mamberamo Raya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Sarmi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				6. Kab. Pegunungan Bintang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				7. Kab. Jayawijaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				8. Kab. Lanny Jaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				9. Kab. Mamberamo Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				10. Kab. Nduga	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				11. Kab. Tolikara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				12. Kab. Yahukimo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				13. Kab. Yalimo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				14. Kab. Puncak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				15. Kab. Puncak Jaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
		Kab. Mimika		1. Kab. Mimika	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	JENIS/ KELOMPOK	WILAYAH KERJA		
				DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
349.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika		Pratama (Kelompok I)	2. Kab. Paniai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Intan Jaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Deiyai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				1. Kab. Biak Numfor	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
350.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak	Kab. Biak Numfor	Pratama (Kelompok I)	2. Kab. Nabire	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Kepulauan Yapen	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Supiori	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Waropen	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				6. Kab. Dogiyai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				1. Kab. Manokwari	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
351.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari	Kab. Manokwari	Pratama (Kelompok I)	2. Kab. Manokwari Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Pegunungan Arfak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Teluk Wondama	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kab. Teluk Bintuni	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				1. Kab. Merauke	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
352.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke	Kab. Merauke	Pratama (Kelompok I)	2. Kab. Asmat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Kab. Boven Digoel	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kab. Mappi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2026
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
 KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ACEH BESAR					
1.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sigli	Kab. Pidie	Kab. Pidie	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
2.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sabang	Kota Sabang	Kota Sabang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LHOKSEUMAWE					
3.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Lhoksukon	Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH					
4.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Calang	Kab. Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
5.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Suka Makmur	Kab. Nagan Raya	Kab. Nagan Raya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN					
6.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Takengon	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
7.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rimba Raya	Kab. Bener Meriah	Kab. Bener Meriah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA					
8.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Karang Baru	Kab. Aceh Tamiang	Kab. Aceh Tamiang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
9.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Blangkejeran	Kab. Gayo Lues	Kab. Gayo Lues	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAPAK TUAN					
10.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Blangpidie	Kab. Aceh Barat Daya	Kab. Aceh Barat Daya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
11.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sinabang	Kab. Simeulue	Kab. Simeulue	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM					
12.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Aceh Singkil	Kab. Aceh Singkil	Kab. Aceh Singkil	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
13.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kutacane	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN					
14.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT					
15.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kualuh Hulu	Kab. Labuhanbatu Utara	Kab. Labuhanbatu Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
16.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kota Pinang	Kab. Labuhanbatu Selatan	Kab. Labuhanbatu Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANG SIANTAR					
17.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Perdagangan	Kab. Simalungun	Kab. Simalungun	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SIDEMPUNAN					
18.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Panyabungan	Kab. Mandailing Natal	Kab. Mandailing Natal	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
19.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sibuhuan	Kab. Padang Lawas	Kab. Padang Lawas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA					
20.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pandan	Kab. Tapanuli Tengah	Kab. Tapanuli Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
21.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Gunung Sitoli	Kota Gunungsitoli	1. Kota Gunungsitoli	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Nias	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			3. Kab. Nias Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			4. Kab. Nias Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			5. Kab. Nias Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIGE					
22.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Dolok Sanggul	Kab. Humbang Hasundutan	Kab. Humbang Hasundutan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
23.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tarutung	Kab. Tapanuli Utara	Kab. Tapanuli Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE					
24.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sidikalang	Kab. Dairi	1. Kab. Dairi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Pakpak Bharat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUMAI					
25.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bagansiapiapi	Kab. Rokan Hilir	Kab. Rokan Hilir	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RENGAT					
26.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tembilahan	Kab. Indragiri Hilir	Kab. Indragiri Hilir	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
27.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Teluk Kuantan	Kab. Kuantan Singingi	Kab. Kuantan Singingi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS					
28.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Duri	Kab. Bengkalis	Kab. Bengkalis	1. Siak Kecil	Seluruh Desa/ Kelurahan
				2. Bukit Batu	Seluruh Desa/ Kelurahan
				3. Bantan	Seluruh Desa/ Kelurahan
				4. Bengkalis	Seluruh Desa/ Kelurahan
29.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Selat Panjang	Kab. Kepulauan Meranti	Kab. Kepulauan Meranti	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG					
30.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pasir Pangarayan	Kab. Rokan Hulu	Kab. Rokan Hulu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI					
31.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Siak Sri Indrapura	Kab. Siak	Kab. Siak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPULAUAN RIAU					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG					
32.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Ranai	Kab. Natuna	1. Kab. Natuna	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
			2. Kab. Kepulauan Anambas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN					
33.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Batu	Kab. Karimun	Kab. Karimun	1. Belat	Seluruh Desa/Kelurahan
				2. Buru	Seluruh Desa/Kelurahan
				3. Durai	Seluruh Desa/Kelurahan
				4. Kundur	Seluruh Desa/Kelurahan
				5. Kundur Barat	Seluruh Desa/Kelurahan
				6. Kundur Utara	Seluruh Desa/Kelurahan
				7. Moro	Seluruh Desa/Kelurahan
				8. Sugie Besar	Seluruh Desa/Kelurahan
				9. Ungar	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN					
34.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Dabo Singkep	Kab. Lingga	Kab. Lingga	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU					
35.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pariaman	Kota Pariaman	1. Kota Pariaman	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
			2. Kab. Padang Pariaman	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA					
36.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tua Pejat	Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
37.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Painan	Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI					
38.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Lubuk Basung	Kab. Agam	Kab. Agam	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
39.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Lubuk Sikaping	Kab. Pasaman	Kab. Pasaman	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
40.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
41.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Simpang Ampat	Kab. Pasaman Barat	Kab. Pasaman Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK					
42.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kotabaru	Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
43.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muaro Sijunjung	Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
44.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Padang Aro	Kab. Solok Selatan	Kab. Solok Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
45.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sawahlunto	Kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH					
46.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Batu Sangkar	Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI TELANAIPURA					
47.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sengeti	Kab. Muaro Jambi	Kab. Muaro Jambi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI PELAYANGAN					
48.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muara Bulian	Kab. Batanghari	Kab. Batanghari	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA BUNGO					
49.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rimbo Bujang	Kab. Tebo	Kab. Tebo	1. Rimbo Bujang	Seluruh Desa/ Kelurahan
				2. Rimbo Ilir	Seluruh Desa/ Kelurahan
				3. Rimbo Ulu	Seluruh Desa/ Kelurahan
				4. Serai Serumpung	Seluruh Desa/ Kelurahan
				5. Tebo Ulu	Seluruh Desa/ Kelurahan
				6. VII Koto	Seluruh Desa/ Kelurahan
				7. VII Koto Ilir	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
50.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muara Tebo	Kab. Tebo	Kab. Tebo	1. Muara Tabir	Seluruh Desa/ Kelurahan
				2. Sumay	Seluruh Desa/ Kelurahan
				3. Tebo Ilir	Seluruh Desa/ Kelurahan
				4. Tebo Tengah	Seluruh Desa/ Kelurahan
				5. Tengah Ilir	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKO					
51.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh	1. Kota Sungai Penuh	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Kerinci	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
52.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sarolangun	Kab. Sarolangun	Kab. Sarolangun	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUALA TUNGKAL					
53.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muara Sabak	Kab. Tanjung Jabung Timur	Kab. Tanjung Jabung Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATURAJA					
54.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muaradua	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
55.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Ogan Komering Ulu Timur	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK LINGGAU					
56.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tugumulyo	Kab. Musi Rawas	1. Kab. Musi Rawas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
			2. Kab. Musi Rawas Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PANDAN					
57.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Manggar	Kab. Belitung Timur	Kab. Belitung Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT					
58.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pagar Alam	Kota Pagar Alam	Kota Pagar Alam	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
59.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Empat Lawang	Kab. Empat Lawang	Kab. Empat Lawang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG					
60.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Indralaya	Kab. Ogan Ilir	Kab. Ogan Ilir	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRABUMULIH					
61.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muara Enim	Kab. Muara Enim	1. Kab. Muara Enim	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan
			2. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEKAYU					
62.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pangkalan Balai	Kab. Banyuasin	Kab. Banyuasin	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA					
63.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muntok	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
64.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sungai Liat	Kab. Bangka	Kab. Bangka	1. Belinyu	Seluruh Desa/ Kelurahan
				2. Riau Silip	Seluruh Desa/ Kelurahan
				3. Sungailiat	Seluruh Desa/ Kelurahan
65.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Toboali	Kab. Bangka Selatan	Kab. Bangka Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
66.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Koba	Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Tengah	1. Koba	Seluruh Desa/ Kelurahan
				2. Lubuk Besar	Seluruh Desa/ Kelurahan
				3. Namang	Seluruh Desa/ Kelurahan
				4. Pangkalan Baru	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO					
67.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bandarjaya	Kab. Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
68.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sukadana	Kab. Lampung Timur	Kab. Lampung Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR					
69.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kalianda	Kab. Lampung Selatan	Kab. Lampung Selatan	1. Kalianda	Seluruh Desa/ Kelurahan
				2. Candipuro	Seluruh Desa/ Kelurahan
				3. Bakauheni	Seluruh Desa/ Kelurahan
				4. Ketapang	Seluruh Desa/ Kelurahan
				5. Palas	Seluruh Desa/ Kelurahan
				6. Penengahan	Seluruh Desa/ Kelurahan
				7. Rajabasa	Seluruh Desa/ Kelurahan
				8. Seragi	Seluruh Desa/ Kelurahan
				9. Sidomulyo	Seluruh Desa/ Kelurahan
				10. Way Panji	Seluruh Desa/ Kelurahan
70.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pringsewu	Kab. Pringsewu	1. Kab. Pringsewu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Tanggamus	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI					
71.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Liwa	Kab. Lampung Barat	1. Kab. Lampung Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Pesisir Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
72.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Menggala	Kab. Tulang Bawang	1. Kab. Tulang Bawang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Tulang Bawang Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			3. Kab. Mesuji	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
73.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Baradatu	Kab. Way Kanan	Kab. Way Kanan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CURUP					
74.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kepahiang	Kab. Kepahiang	Kab. Kepahiang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU SATU					
75.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muko-Muko	Kab. Muko	Kab. Muko	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU DUA					
76.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Manna	Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
77.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bintuhan	Kab. Kaur	Kab. Kaur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA UTARA					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN					
78.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kepulauan Seribu	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG					
79.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rangkas Bitung	Kab. Lebak	Kab. Lebak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI					
80.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pelabuhan Ratu	Kab. Sukabumi	Kab. Sukabumi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS					
81.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Banjar	Kota Banjar	Kota Banjar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUNINGAN					
82.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Majalengka	Kab. Majalengka	Kab. Majalengka	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL					
83.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu	Kab. Brebes	Kab. Brebes	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA					
84.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Ungaran	Kab. Semarang	Kab. Semarang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI					
85.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rembang	Kab. Rembang	Kab. Rembang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG					
86.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kendal	Kab. Kendal	Kab. Kendal	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLORA					
87.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Purwodadi	Kab. Grobogan	Kab. Grobogan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP					
88.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Majenang	Kab. Cilacap	Kab. Cilacap	1. Majenang	Seluruh Desa/ Kelurahan
				2. Cimanggu	Seluruh Desa/ Kelurahan
				3. Cipari	Seluruh Desa/ Kelurahan
				4. Dayeuh-luhur	Seluruh Desa/ Kelurahan
				5. Gandrung-mangu	Seluruh Desa/ Kelurahan
				6. Karangpu-cung	Seluruh Desa/ Kelurahan
				7. Kedungreja	Seluruh Desa/ Kelurahan
				8. Bantarsari	Seluruh Desa/ Kelurahan
				9. Patimuan	Seluruh Desa/ Kelurahan
				10. Sidareja	Seluruh Desa/ Kelurahan
				11. Wanareja	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG					
89.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muntilan	Kab. Magelang	Kab. Magelang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR					
90.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sragen	Kab. Sragen	Kab. Sragen	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURBALINGGA					
91.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Banjarnegara	Kab. Banjarnegara	Kab. Banjarnegara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO					
92.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Wonogiri	Kab. Wonogiri	Kab. Wonogiri	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG					
93.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo	Kab. Wonosobo	Kab. Wonosobo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MOJOKERTO					
94.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Mojokerto	Kab. Mojokerto	Kab. Mojokerto	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAMEKASAN					
95.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sumenep	Kab. Sumenep	Kab. Sumenep	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN					
96.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Caruban	Kab. Madiun	Kab. Madiun	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKALAN					
97.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sampang	Kab. Sampang	Kab. Sampang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NGAWI					
98.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Magetan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO					
99.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pacitan	Kab. Pacitan	Kab. Pacitan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASURUAN					
100.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bangil	Kab. Pasuruan	Kab. Pasuruan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PROBOLINGGO					
101.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kraksaan	Kab. Probolinggo	Kab. Probolinggo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
102.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Lumajang	Kab. Lumajang	Kab. Lumajang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG					
103.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek	Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR					
104.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Wlingi	Kab. Blitar	Kab. Blitar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE					
105.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nganjuk	Kab. Nganjuk	Kab. Nganjuk	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SITUBONDO					
106.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bondowoso	Kab. Bondowoso	Kab. Bondowoso	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGKAWANG					
107.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bengkayang	Kab. Bengkayang	Kab. Bengkayang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
108.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sambas	Kab. Sambas	Kab. Sambas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUBU RAYA					
109.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Mempawah	Kab. Mempawah	Kab. Mempawah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SANGGAU					
110.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Ngabang	Kab. Landak	Kab. Landak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
111.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sekadau	Kab. Sekadau	Kab. Sekadau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG					
112.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Putussibau	Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
113.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nangapinoh	Kab. Melawi	Kab. Melawi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA					
114.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kuala Kurun	Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
115.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kuala Kapuas	Kab. Kapuas	Kab. Kapuas	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
116.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMPIT					
117.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kasongan	Kab. Katingan	Kab. Katingan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
118.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kuala Pembuang	Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALANBUN					
119.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nanga Bulik	Kab. Lamandau	Kab. Lamandau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
120.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sukamara	Kab. Sukamara	Kab. Sukamara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA TEWEH					
121.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Buntok	Kab. Barito Selatan	Kab. Barito Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
122.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tamiang Layang	Kab. Barito Timur	Kab. Barito Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
123.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Puruk Cahu	Kab. Murung Raya	Kab. Murung Raya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN					
124.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Marabahan	Kab. Barito Kuala	Kab. Barito Kuala	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARBARU					
125.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pelaihari	Kab. Tanah Laut	Kab. Tanah Laut	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
126.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Martapura	Kab. Banjar	Kab. Banjar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BARABAI					
127.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rantau	Kab. Tapin	Kab. Tapin	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
128.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kandangan	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATULICIN					
129.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kota Baru	Kab. Kotabaru	Kab. Kotabaru	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG					
130.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Paringin	Kab. Balangan	Kab. Balangan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
131.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Amuntai	Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TARAKAN					
132.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nunukan	Kab. Nunukan	Kab. Nunukan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BONTANG					
133.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sangatta	Kab. Kutai Timur	Kab. Kutai Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM					
134.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tanah Grogot	Kab. Paser	Kab. Paser	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG REDEB					
135.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Selor	Kab. Bulungan	Kab. Bulungan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
136.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Malinau	Kab. Malinau	Kab. Malinau	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TENGGARONG					
137.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sendawar	Kab. Kutai Barat	1. Kab. Kutai Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Mahakam Ulu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE					
138.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Enrekang	Kab. Enrekang	Kab. Enrekang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
139.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pinrang	Kab. Pinrang	Kab. Pinrang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
140.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	Kab. Sidenreng Rappang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALOPO					
141.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Malili	Kab. Luwu Timur	Kab. Luwu Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
142.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Masamba	Kab. Luwu Utara	Kab. Luwu Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
143.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Makale	Kab. Toraja Utara	1. Kab. Toraja Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Tana Toraja	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA					
144.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Benteng	Kab. Kepulauan Selayar	Kab. Kepulauan Selayar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
145.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sinjai	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG					
146.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bontosunggu	Kab. Jeneponto	Kab. Jeneponto	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
147.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa	Kab. Gowa	Kab. Gowa	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
148.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Takalar	Kab. Takalar	Kab. Takalar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE					
149.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Watansoppeng	Kab. Soppeng	Kab. Soppeng	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
150.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sengkang	Kab. Wajo	Kab. Wajo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS					
151.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pangkajene	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI					
152.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Unaaha	Kab. Konawe	1. Kab. Konawe	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Konawe Kepulauan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE					
153.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Polewali	Kab. Polewali Mandar	Kab. Polewali Mandar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
154.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Mamasa	Kab. Mamasa	Kab. Mamasa	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU					
155.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Pasangkayu	Kab. Pasangkayu	Kab. Pasangkayu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA					
156.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Lasusua	Kab. Kolaka Utara	Kab. Kolaka Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
157.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Rumbia	Kab. Bombana	Kab. Bombana	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAUBAU					
158.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Raha	Kab. Muna	1. Kab. Muna	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Muna Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO					
159.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tomohon	Kab. Tomohon	Kab. Tomohon	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO					
160.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Limboto	Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
161.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Marissa	Kab. Pohuwato	Kab. Pohuwato	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
162.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Talamuta	Kab. Boalemo	Kab. Boalemo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG					
163.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tondano	Kab. Minahasa	Kab. Minahasa	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTAMOBAGU					
164.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Amurang	Kab. Minahasa Selatan	Kab. Minahasa Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAHUNA					
165.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Talaud	Kab. Kepulauan Talaud	Kab. Kepulauan Talaud	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU					
166.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Banawa	Kab. Donggala	Kab. Donggala	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
167.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Parigi	Kab. Parigi Moutong	Kab. Parigi Moutong	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK					
168.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Banggai	Kab. Banggai Kepulauan	1. Kab. Banggai Kepulauan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Banggai Laut	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO					
169.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bungku	Kab. Poso	1. Kab. Poso	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Tojo Una Una	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOLI TOLI					
170.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Buol	Kab. Buol	Kab. Buol	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERNATE					
171.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sanana	Kab. Kepulauan Sula	1. Kab. Kepulauan Sula	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Pulau Taliabu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
172.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tidore	Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
173.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Labuha	Kab. Halmahera Selatan	Kab. Halmahera Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO					
174.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Maba	Kab. Halmahera Timur	Kab. Halmahera Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BALI					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA					
175.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kerobokan	Kab. Kuta Utara	Kab. Kuta Utara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR					
176.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Ubud	Kab. Gianyar	Kab. Gianyar	1. Ubud	Seluruh Desa/ Kelurahan
				2. Payangan	Seluruh Desa/ Kelurahan
				3. Sukawati	Seluruh Desa/ Kelurahan
				4. Tampaksiring	Seluruh Desa/ Kelurahan
				5. Tegallalang	Seluruh Desa/ Kelurahan
177.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Amlapura	Kab. Karangasem	Kab. Karangasem	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN					
178.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Negara	Kab. Jembrana	Kab. Jembrana	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM TIMUR					
179.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Gerung	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Barat	1. Gerung	Seluruh Desa/ Kelurahan
				2. Kuripan	Seluruh Desa/ Kelurahan
				3. Kediri	Seluruh Desa/ Kelurahan
				4. Lembar	Seluruh Desa/ Kelurahan
				5. Sekotong	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA					
180.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Dompu	Kab. Dompu	Kab. Dompu	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR					
181.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA					
182.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Selong	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAUMERE					
183.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Larantuka	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG					
184.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Baa	Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
185.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kalabahi	Kab. Alor	Kab. Alor	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ENDE					
186.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bajawa	Kab. Ngada	Kab. Ngada	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RUTENG					
187.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Labuan Bajo	Kab. Manggarai	Kab. Manggarai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			Kab. Manggarai Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA					
188.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Soe	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WAINGAPU					
189.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Waikabubak	Kab. Sumba Barat	Kab. Sumba Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON					
190.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Namlea	Kab. Buru	1. Kab. Buru	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Buru Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
191.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Masohi	Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
192.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Piru	Kab. Seram Bagian Barat	Kab. Seram Bagian Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
193.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bula	Kab. Seram Bagian Timur	Kab. Seram Bagian Timur	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
194.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Dobo	Kab. Kepulauan Aru	Kab. Kepulauan Aru	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
195.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Langgur	Kab. Maluku Tenggara	1. Kab. Maluku Tenggara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kota Tual	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
196.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Saumlaki	Kab. Kepulauan Tanimbar	1. Kab. Kepulauan Tanimbar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Maluku Barat Daya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SORONG					
197.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Fakfak	Kab. Fak Fak	Kab. Fak Fak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
198.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Teminabuan	Kab. Sorong Selatan	Kab. Sorong Selatan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
199.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kaimana	Kab. Kaimana	Kab. Kaimana	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA		
			DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAYAPURA					
200.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sarmi	Kab. Sarmi	Kab. Sarmi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
201.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Wamena	Kab. Jayawijaya	Kab. Jayawijaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIAK					
202.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Serui	Kab. Kepulauan Yapen	Kab. Kepulauan Yapen	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
203.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Nabire	Kab. Nabire	1. Kab. Waropen	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
			2. Kab. Nabire	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANOKWARI					
204.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bintuni	Kab. Teluk Bintuni	Kab. Teluk Bintuni	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

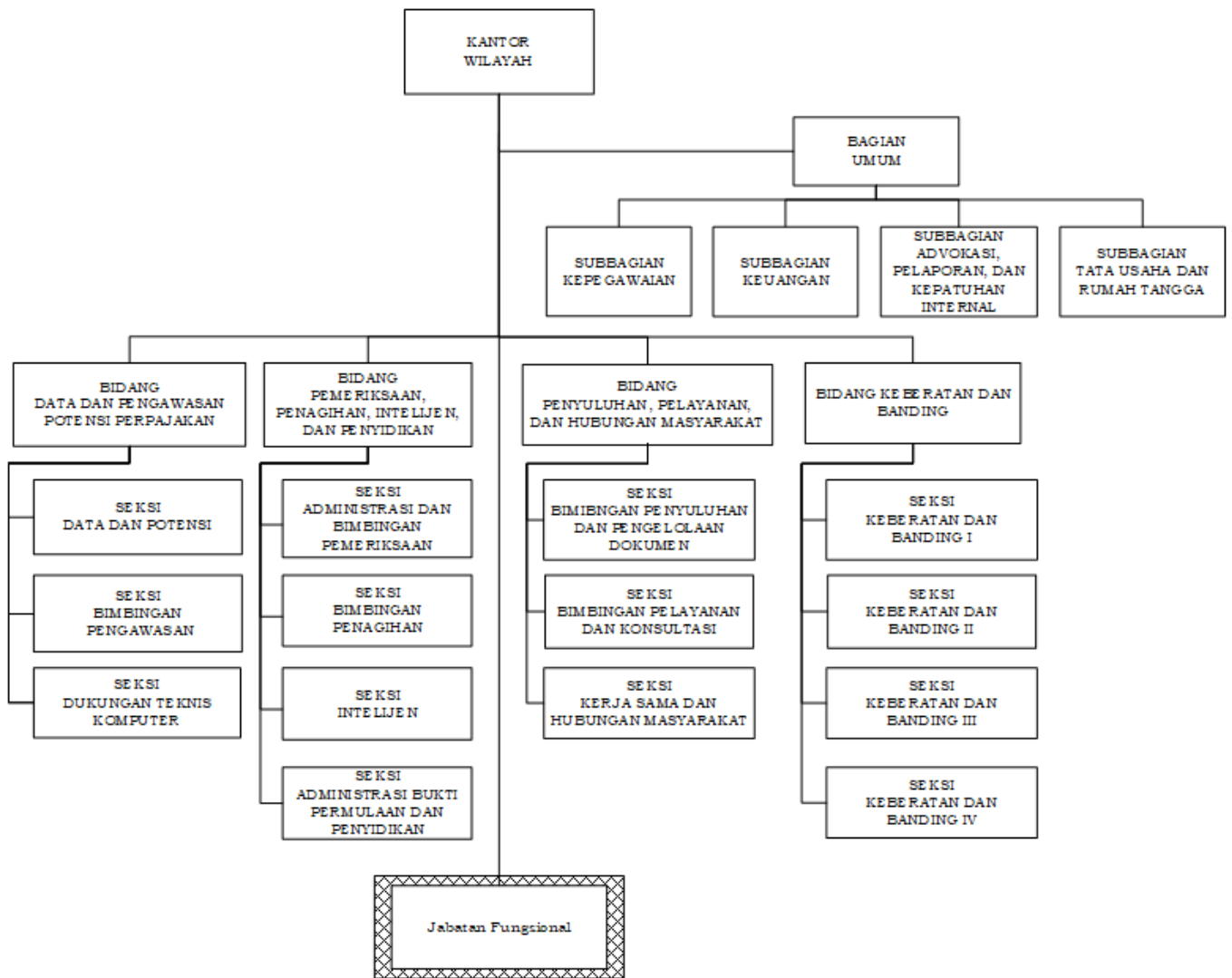
ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

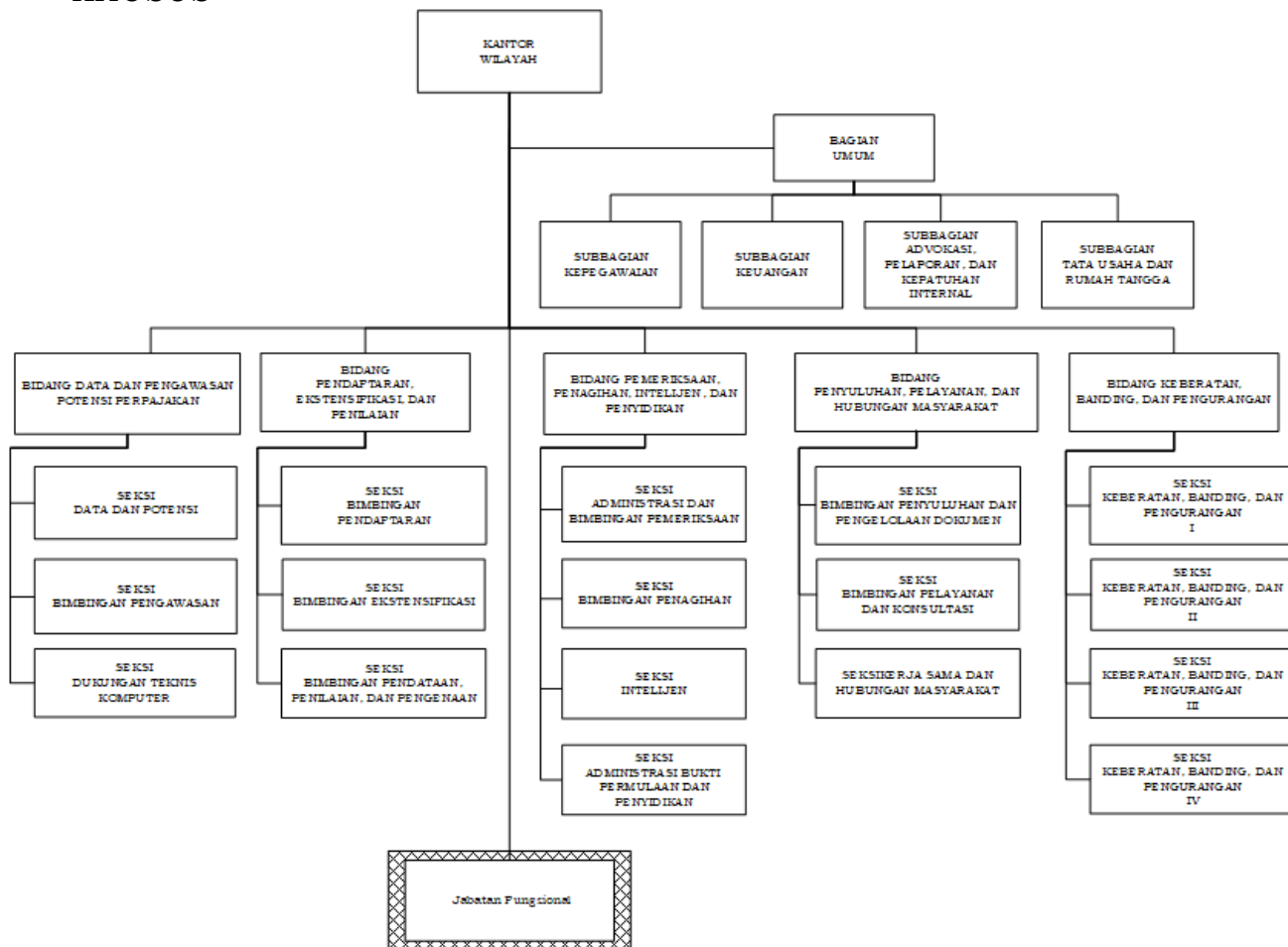
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL

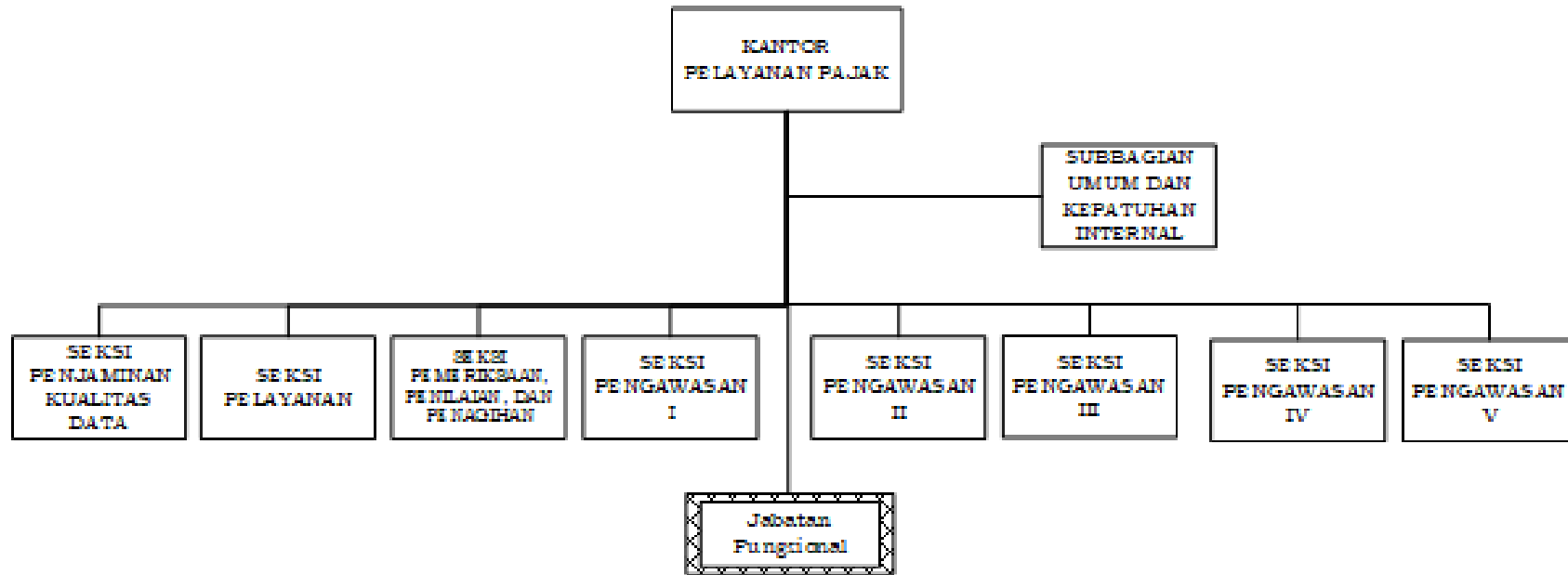
A. BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK JAKARTA KHUSUS



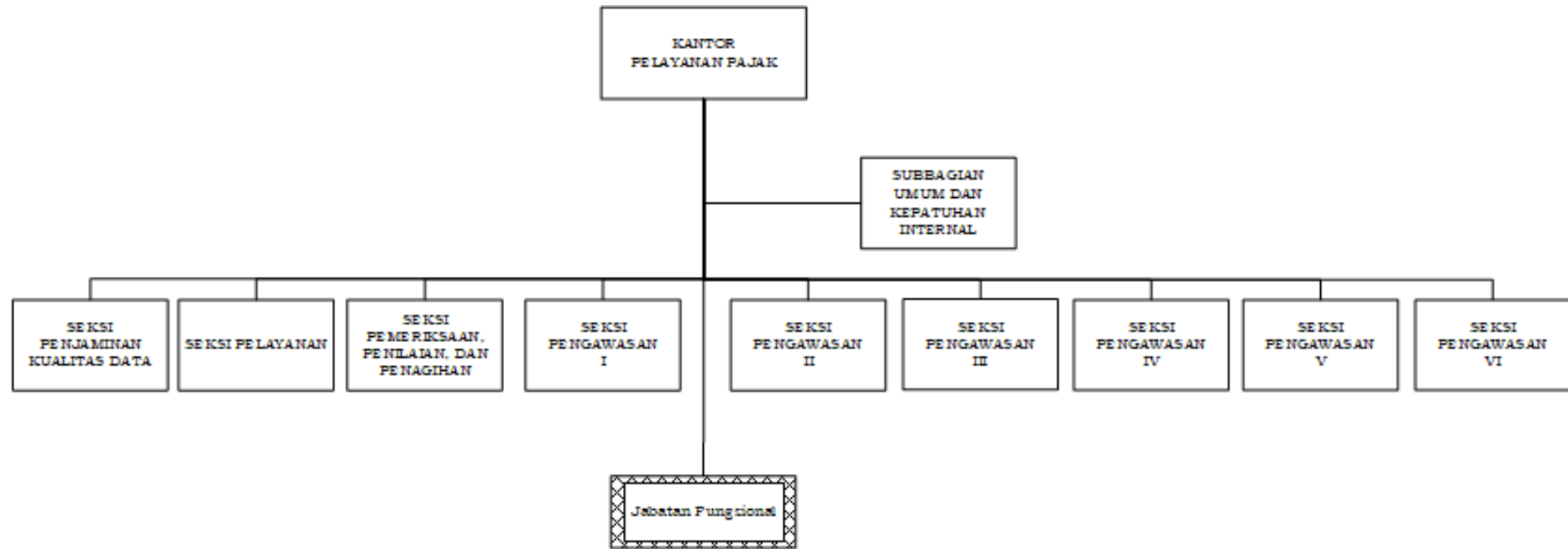
B. BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS



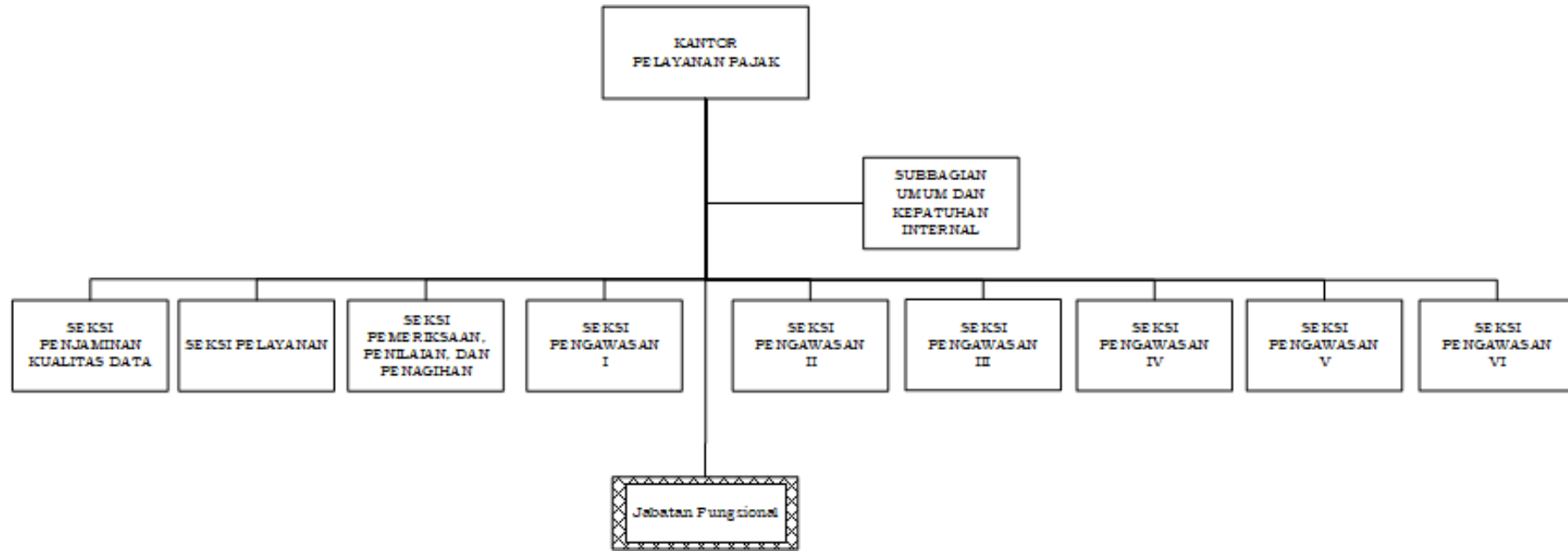
C. BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KHUSUS



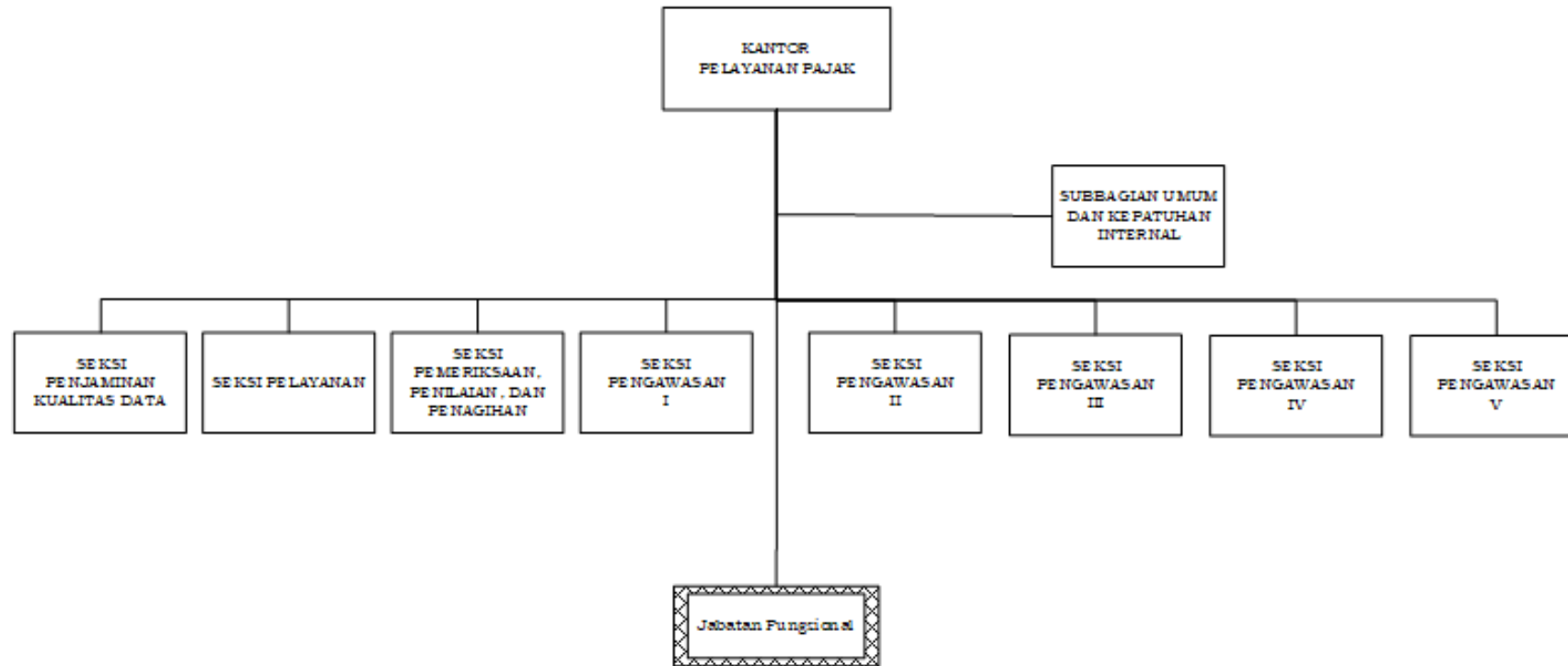
D. BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA



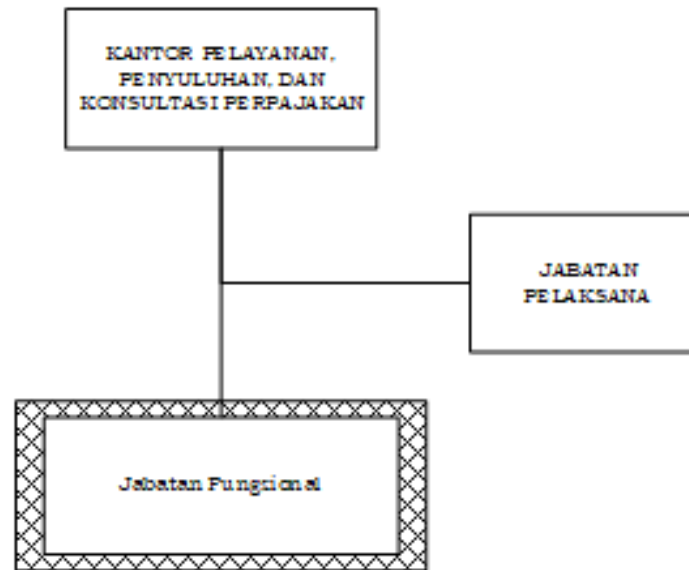
E. BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK I)



F. BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK II)



G. BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA